

FAKTA SEJARAH MATARAM ISLAM

Awal sampai Akhir



KASMUI

FAKTA SEJARAH MATARAM ISLAM

Awal sampai Akhir



KASMUI

KATA PENGANTAR (IFTITAH):

Penulisan sejarah Mataram Islam sering kali berada pada persimpangan antara dua kutub narasi yang saling menegasi: romantisme filologis yang bersumber dari tradisi *babad* dan skeptisisme positivistik yang bersumber dari laporan-laporan kolonial (*General Missiven* atau *Daghregister* VOC). Mataram Islam, yang berdiri di atas reruntuhan hegemoni Majapahit dan pasca-keruntuhan Demak, bukan sekadar sebuah entitas politik yang menguasai teritorial Jawa, melainkan sebuah eksperimen sosiopolitik dan teologis yang mencoba mengintegrasikan kearifan lokal (*local genius*) dengan nilai-nilai universalitas Islam.

Urgensi buku ini, "**Fakta Sejarah Mataram Islam: Awal sampai Akhir**", terletak pada upaya dekonstruksi terhadap mitos-mitos politik yang sering kali mengaburkan realitas historis. Kita tidak hanya melihat Mataram sebagai sebuah monarki agraris yang despotik, tetapi sebagai sebuah kekuatan yang mampu melakukan sinkretisasi epistemologis, sebagaimana terlihat dalam perubahan kalender Saka ke kalender Jawa-Hijriah oleh Sultan Agung. Terdapat "gap" riset yang cukup lebar dalam literatur sejarah kita, di mana analisis sering kali terhenti pada narasi peperangan dan perebutan tahta, tanpa menyentuh struktur terdalam dari ekonomi-politik dan pergeseran identitas keagamaan masyarakatnya.

Sebagai landasan filosofis, sejarah dalam perspektif Islam bukan sekadar kronik masa lalu, melainkan *ibrah* (pelajaran) bagi peradaban masa depan. Sebagaimana firman Allah SWT:

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ ۚ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ

"Katakanlah: 'Adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang dulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah).'" [QS. Ar-Rum: 42].

Ayat ini memerintahkan kita untuk melakukan observasi kritis (*deep-dive*) terhadap jatuh banggunya sebuah bangsa. Mataram Islam memberikan potret nyata tentang bagaimana sebuah kepemimpinan yang kuat dapat menyatukan nusantara, namun di sisi lain, benih-benih disintegrasi internal dan ketergantungan pada kekuatan asing (VOC) menjadi lonceng kematian bagi kedaulatannya. Hal ini sejalan dengan peringatan Nabi Muhammad SAW mengenai amanah kepemimpinan:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

"Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnnya." [HR. Bukhari no. 893].

Buku ini akan menggunakan pendekatan multidisiplin. Kita akan membedah bagaimana strategi ekonomi-agraria Mataram yang berbasis pada sistem *caca* (cacah penduduk) menjadi tulang punggung militerisme mereka, namun juga menjadi titik lemah ketika berhadapan dengan merkantilisme global yang dibawa oleh bangsa Eropa. Dengan menggunakan literatur bereputasi seperti karya M.C. Ricklefs, H.J. de Graaf, hingga Soemarsaid Moertono, buku ini berupaya menyajikan fakta sejarah yang otoritatif dan lepas dari sekadar mistifikasi kekuasaan.

Harapan penulis, karya ini dapat menjadi referensi akademis yang mampu memicu diskusi kritis lebih lanjut mengenai jati diri bangsa dan posisi Islam dalam konstelasi politik di tanah Jawa. Mataram Islam bukan hanya masa lalu yang selesai, ia adalah cermin tempat kita melihat wajah politik dan keagamaan kita hari ini.

Semarang, April 2026

Penulis,

Kasmui

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR (IFTITAH):	3
DAFTAR ISI	5
BAB 1: KOSMOLOGI DAN GENEALOGI MATARAM ISLAM	7
1.1 Latar Belakang Epistemologis: Membedah <i>Babad Tanah Jawi</i> , Arsip VOC, dan Fakta Historis	7
1.2 Demografi dan Lanskap Geopolitik Jawa Abad ke-16: Pasca-Majapahit dan Demak.....	9
1.3 Runtuhnya Pajang dan Bangkitnya Alas Mentaok: Strategi Politik Ki Ageng Pemanahan dan Sutawijaya	11
DAFTAR PUSTAKA BAB 1	14
BAB 2: KONSOLIDASI AWAL DAN PENEGAKAN LEGITIMASI (1587–1613)	15
2.1 Panembahan Senopati: Manuver Ekspansi, Legitimasi Mitos (Kanjeng Ratu Kidul), dan Realitas Militer.....	15
2.2 Penaklukan Wilayah Timur: Konflik Terbuka dengan Surabaya, Madiun, dan Pasuruan	17
2.3 Era Panembahan Sedakrapyak (1601–1613): Pemberontakan Internal dan Transisi Menuju Puncak Kejayaan	19
DAFTAR PUSTAKA BAB 2	22
BAB 3: ERA IMPERIUM DAN PUNCAK KEJAYAAN SULTAN AGUNG (1613–1645)	23
3.1 Visi Penyatuan Jawa: Penaklukan Tuban, Madura, dan Penundukan Kesultanan Surabaya.....	23
3.2 Invasi Batavia (1628 & 1629): Analisis Kritis Strategi Militer, Logistik, Wabah, dan Fakta Kegagalan	25
3.3 Transformasi Kultural dan Sains Astronomi: Penciptaan Kalender Jawa (Sinkretisme Epistemologi Saka dan Hijriah)	28
3.4 Sistem Agraria, Caca, dan Birokrasi Feodal Mataram: Despotisme yang Membangun Peradaban	30
DAFTAR PUSTAKA BAB 3	32
BAB 4: KEMUNDURAN DAN INTERVENSI KOLONIAL (1646–1677)	34
4.1 Despotisme Berdarah Amangkurat I: Sentralisasi Ekstrem, Konflik Keraton, dan Pembantaian Ulama	34
4.2 Pemberontakan Trunojoyo dan Runtuhnya Keraton Plered: Aliansi Madura-Makassar dan Runtuhnya Mitos Kekebalan Mataram	36
4.3 Perjanjian Jepara (1677) dan Pelarian Amangkurat II: Titik Balik Hilangnya Kedaulatan Mataram kepada Kompeni	38

DAFTAR PUSTAKA BAB 4	41
BAB 5: ERA KARTASURA: KONFLIK SUKSESI DAN HEGEMONI VOC (1680–1745)	42
5.1 Perang Suksesi Jawa I, II, dan III: Fakta Terbelahnya Dinasti Mataram dan Intervensi Asing	42
5.2 Untung Surapati dan Upaya Resistensi Anti-Kolonial dari Timur.....	44
5.3 Geger Pecinan (1740–1743): Jatuhnya Keraton Kartasura dan Pakubuwana II	46
5.4 Penyerahan Kedaulatan Definitif: Perjanjian 1743 sebagai Kontrak Tunduk pada VOC	48
DAFTAR PUSTAKA BAB 5	50
BAB 6: GIYANTI DAN PALIHAN NAGARI: BERAKHIRNYA KESATUAN MATARAM (1745–1757)	52
6.1 Perpindahan ke Surakarta dan Munculnya Friksi Baru	52
6.2 Perang Mangkubuman: Strategi Gerilya Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said (Pangeran Sambernyawa)	54
6.3 Fakta Politik Perjanjian Giyanti (1755): Siasat Divide et Impera Nicolas Hartingh dan Lahirnya Kasunanan & Kasultanan	56
6.4 Perjanjian Salatiga (1757): Lahirnya Mangkunegaran dan Fragmentasi Total Mataram Islam....	59
DAFTAR PUSTAKA BAB 6	62
BAB 7: EPILOG: WARISAN DAN ANALISIS KRITIS	63
7.1 Mengapa Imperium Agraris Jawa Runtuh?: Analisis Struktural dan Kultural	63
7.2 Dampak Palihan Nagari terhadap Sosio-Kultural, Identitas, dan Hukum Islam di Jawa.....	64
7.3 Kesimpulan: Mataram dalam Lanskap Sejarah Nusantara	67
DAFTAR PUSTAKA BAB 7	69
BAB 8: RINGKASAN SEJARAH MATARAM ISLAM	70
DAFTAR PUSTAKA LENGKAP	72
GLOSARIUM ISTILAH (A-Z)	74
LAMPIRAN 1 Peta Kekuasaan Mataram Islam	77
LAMPIRAN 2 Timeline Raja-Raja Mataram Islam (1587–1755)	79

BAB 1: KOSMOLOGI DAN GENEALOGI MATARAM ISLAM

1.1 Latar Belakang Epistemologis: Membedah *Babad Tanah Jawi*, Arsip VOC, dan Fakta Historis

Meneliti sejarah Mataram Islam pada esensinya adalah menavigasi sebuah labirin epistemologis yang kompleks. Para sejarawan, baik klasik maupun kontemporer, senantiasa dihadapkan pada dualisme sumber yang memiliki paradigma, motif, dan *worldview* (pandangan dunia) yang saling bertolak belakang: di satu sisi terdapat historiografi tradisional Jawa yang terepresentasi secara paradigmatis dalam *Babad Tanah Jawi*, dan di sisi lain terdapat historiografi kolonial yang bertumpu pada dokumen-dokumen *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC) seperti *Dagh-Register* (Catatan Harian) dan *Generale Missiven* (Laporan Umum).

Untuk merekonstruksi sejarah Mataram yang mendekati realitas objektif—bukan sekadar mitos legitimasi penguasa atau narasi orientalis Eropa—kita memerlukan analisis silang (triangulasi) yang metodologis dan kritis.

1. *Babad Tanah Jawi* sebagai Teks Teologis-Politis

Dalam tradisi intelektual Jawa pramodern, penulisan sejarah (historiografi) tidak berorientasi pada pencatatan kronologis yang presisi (*anals*), melainkan berfungsi sebagai instrumen legitimasi kekuasaan (*political charter*). *Babad Tanah Jawi*, yang disusun dan direvisi secara berkala di keraton (terutama pada era Mataram akhir hingga Kartasura dan Surakarta), adalah sebuah teks kosmologis yang bertujuan mengikat tatanan mikrokosmos (kerajaan) dengan makrokosmos (kehendak Ilahi atau semesta).

Secara epistemologis, *Babad* menggunakan konsep waktu siklis dan sering kali mencampuradukkan antara fakta empiris, mitos, dan genealogi ilahiah. Raja-raja Mataram, dari Panembahan Senopati hingga Sultan Agung, dikonstruksi nasabnya sedemikian rupa agar tersambung tidak hanya kepada para Nabi (seperti Nabi Adam dan Nabi Muhammad SAW), tetapi juga kepada tokoh-tokoh pewayangan (seperti Pandawa) dan penguasa gaib (Kanjeng Ratu Kidul). Dalam pandangan C.C. Berg, seorang filolog terkemuka, *Babad* berfungsi seperti "sihir kata-kata" (*verbal magic*); ia ditulis bukan untuk menceritakan apa yang *telah* terjadi, tetapi untuk menciptakan realitas politik agar penguasa saat itu diakui keabsahannya oleh rakyat.

Namun demikian, menolak *Babad* sepenuhnya sebagai sumber sejarah adalah sebuah bias saintisme. Di balik selubung mitos, *Babad Tanah Jawi* merekam denyut sosiologis, struktur hierarki, intrik keraton, dan pergeseran nilai dari Hindu-Buddha menuju Islam, yang mustahil ditemukan dalam catatan-catatan dagang Eropa.

2. Arsip VOC: Realisme Kolonial yang Pragmatis

Sebagai antitesis dari *Babad*, arsip-arsip VOC menyajikan data dengan tingkat positivisme yang tinggi. Surat-surat laporan gubernur jenderal, catatan syahbandar, dan jurnal perjalanan utusan

Belanda (seperti Rijklof van Goens) memberikan data kuantitatif yang luar biasa rinci: fluktuasi harga beras, jumlah armada kapal Demak dan Mataram, peta topografi, wabah penyakit, hingga taktik militer yang digunakan pasukan Sultan Agung saat mengepung Batavia.

Namun, arsip VOC memiliki kelemahan epistemologis yang tak kalah fatal: **Eurosentrisme** dan **Keterbatasan Kultural**. Para penulis VOC adalah pedagang dan serdadu. Mereka mencatat fenomena politik Jawa murni dari kacamata untung-rugi komersial dan ancaman keamanan. Mereka sering kali gagal memahami motivasi spiritual atau filosofi *Manunggaling Kawula Gusti* yang mendasari manuver politik raja-raja Mataram. H.J. de Graaf, pionir studi sejarah Jawa modern, membuktikan bahwa catatan VOC sangat akurat untuk merekonstruksi "kapan" dan "di mana" sebuah peristiwa terjadi, tetapi sering kali keliru atau bias dalam menyimpulkan "mengapa" (*the motives*) orang Jawa melakukan hal tersebut.



3. Pendekatan Analitis: Triangulasi Epistemologi Islam

Dalam merekonstruksi sejarah Mataram Islam, ilmu sejarah modern sejalan dengan tradisi epistemologi Islam, khususnya dalam metodologi kritik sanad dan matan (*'Ilm al-Dirayah* dan *'Ilm al-Riwayah*). Mencari kebenaran historis di antara laporan yang sarat kepentingan mengharuskan seorang peneliti melakukan *tabayyun* (verifikasi silang yang ketat).

Allah SWT secara eksplisit meletakkan dasar epistemologi validasi informasi ini di dalam Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

"Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu." [QS. Al-Hujurat: 6].

Dalam konteks historiografi, *tabayyun* berarti kita tidak menelan mentah-mentah klaim kesaktian Panembahan Senopati dalam *Babad* (sebagai teks internal yang bias legitimasi), dan kita juga tidak serta-merta mempercayai label "pemberontak" atau "raja tiran" yang disematkan oleh VOC kepada penguasa Mataram (sebagai teks eksternal yang bias kolonial).

Hal ini diperkuat oleh prinsip kejujuran dalam merekam masa lalu, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW mengenai pentingnya integritas data:

إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ

"Jauhilah oleh kalian prasangka, karena sesungguhnya prasangka itu adalah perkataan yang paling dusta." (HR. Bukhari no. 6064 dan Muslim no. 2563, *Shahih*).

Analisis *Babad* dan arsip VOC yang sekadar bertumpu pada *dhann* (prasangka subjektif) tanpa metode komparasi kritis (seperti sinkronisasi tarikh hijriah/jawa dengan kalender masehi kompeni) hanya akan menghasilkan roman fiksi belaka, bukan karya sejarah yang otoritatif. Oleh karena itu, *Fakta Sejarah Mataram Islam* dalam buku ini dikonstruksi melalui dialektika kedua sumber tersebut: meminjam "kerangka waktu dan data material" dari arsip VOC, lalu mengisinya dengan "jiwa, kebudayaan, dan rasionalitas lokal" dari teks-teks Jawa.

1.2 Demografi dan Lanskap Geopolitik Jawa Abad ke-16: Pasca-Majapahit dan Demak

Abad ke-16 merupakan periode transisi yang paling krusial sekaligus paling bergejolak dalam konstelasi sejarah Nusantara, khususnya di Pulau Jawa. Runtuhnya imperium Majapahit (secara definitif pada 1527) dan kemunculan Kesultanan Demak menandai pergeseran fundamental tidak hanya dalam aspek teologis dari Hindu-Buddha ke Islam, tetapi juga transformasi sistem ekonomi-politik dari agraris-pedalaman menuju maritim-pesisir. Namun, hegemoni pesisir ini tidak bertahan lama, yang pada akhirnya memicu kevakuman kekuasaan (*power vacuum*) dan membuka jalan bagi kebangkitan kembali kekuatan pedalaman yang kelak dikapitalisasi oleh Mataram.

Untuk memahami kemunculan Mataram Islam secara komprehensif, kita wajib membedah dua variabel utama pada abad ke-16: struktur demografi agraria dan balkanisasi geopolitik pasca-Demak.

1. Struktur Demografi dan Polarisasi Sosio-Ekonomi Abad ke-16

Berdasarkan analisis demografis yang dikemukakan oleh Anthony Reid dalam kajiannya mengenai Asia Tenggara di Kurun Niaga (*Southeast Asia in the Age of Commerce*), populasi Pulau Jawa pada abad ke-16 diperkirakan masih relatif jarang, yakni berkisar antara 3 hingga 4 juta jiwa.

Konsentrasi demografis terbelah menjadi dua ekosistem sosio-ekonomi yang secara kultural saling bertolak belakang:

- **Masyarakat Pesisir Utara (Pasisiran):** Terpusat di kota-kota pelabuhan niaga internasional seperti Demak, Jepara, Tuban, Gresik, dan Surabaya. Kawasan ini bersifat kosmopolitan, egaliter, dan mengandalkan akumulasi kapital dari perdagangan rempah-rempah. Islam yang berkembang di sini lebih puritan dan berorientasi pada jaringan ulama internasional (Timur Tengah dan Gujarat).
- **Masyarakat Pedalaman (Kejawen/Vorstenlanden):** Terkonsentrasi di lembah-lembah sungai subur seperti Bengawan Solo dan Sungai Brantas (Pajang, Pengging, dan kelak Mentaok). Ekosistem ini mengandalkan budidaya padi sawah yang membutuhkan pengerahan tenaga kerja masif dan irigasi terpusat. Hal ini melahirkan struktur masyarakat yang sangat hierarkis, feodal, dan patron-klien (*kawula-gusti*). Islam di wilayah ini mengalami asimilasi dan sinkretisasi yang kuat dengan sisa-sisa kosmologi mistik Hindu-Buddha.

Secara makro, lanskap demografis yang terbelah ini menciptakan tensi permanen. Pesisir membutuhkan beras dari pedalaman untuk menyuplai kapal-kapal dagang mereka, sementara pedalaman membutuhkan akses ke pelabuhan pesisir untuk mendistribusikan surplus agraria dan mendapatkan barang mewah serta senjata api.



2. Balkanisasi Geopolitik Pasca-Demak (1546–1580-an)

Puncak kejayaan Demak berakhir tragis pasca-gugurnya Sultan Trenggana dalam ekspedisi militer ke Panarukan pada tahun 1546. Kematianannya memicu perang suksesi berdarah antara Sunan Prawoto dan Arya Penangsang, yang pada akhirnya meruntuhkan sentralisasi kekuasaan pesisir.

Periode setelah tahun 1546 dapat diidentifikasi sebagai era "balkanisasi" Jawa, di mana pulau ini terpecah menjadi puluhan kadipaten independen yang saling bersaing.

H.J. de Graaf dan Th.G.Th. Pigeaud dalam *Islamic States in Java 1500-1700* memetakan lanskap geopolitik Jawa pasca-Demak ke dalam tiga kutub kekuatan utama:

1. **Kutub Barat (Kesultanan Banten):** Di bawah dinasti keturunan Sunan Gunung Jati, Banten mengisolasi diri dari konflik Jawa Tengah dan pesat membangun hegemoni niaga lada di Selat Sunda, bersaing langsung dengan Portugis di Malaka dan kelak VOC.
2. **Kutub Timur (Surabaya dan Aliansi Bangbang Wetan):** Kesultanan Surabaya bangkit menjadi kekuatan maritim paling menakutkan di timur. Mereka mengkonsolidasi aliansi dengan Pasuruan, Tuban, dan Madura. Surabaya mengontrol jalur niaga menuju Kepulauan Maluku dan mempertahankan ortodoksi Islam pesisir.
3. **Kutub Tengah-Pedalaman (Pajang):** Di bawah kepemimpinan Jaka Tingkir (Sultan Hadiwijaya), pusat kekuasaan politik ditarik kembali dari pesisir Demak ke pedalaman agraris (Pajang, dekat Surakarta saat ini). Pajang adalah entitas transisional; mereka mewarisi legitimasi Demak (sebagai pewaris Raden Patah), namun secara kultural mengembalikan bandul peradaban ke gaya pedalaman (Majapahit).

3. Hutan Mentaok: Titik Nol Pergeseran Episentrum

Di tengah polarisasi Surabaya di Timur dan Banten di Barat, Pajang sebagai hegemon di tengah mengalami kerapuhan struktural akibat ketiadaan akses laut yang kuat dan administrasi birokrasi yang longgar terhadap *vasal* (daerah bawahan).

Lanskap geopolitik inilah yang secara jeli dibaca oleh Ki Ageng Pemanahan. Sebagai hadiah atas jasanya menumpas Arya Penangsang, Pemanahan meminta sebidang tanah perdikan di **Alas Mentaok** (sebelah selatan Gunung Merapi, kini Kotagede, Yogyakarta). Secara agronomis, Mentaok adalah lahan vulkanis super-subur yang menanti untuk dieksploitasi. Secara militer, wilayah ini dilindungi oleh benteng alam (Gunung Merapi di utara, perbukitan karst Gunungkidul dan Samudra Hindia di selatan).

Pemberian Alas Mentaok pada tahun 1556 (versi Babad) bukanlah sebuah peristiwa kebetulan, melainkan strategi Pemanahan untuk membangun basis demografi dan pangan yang independen, jauh dari jangkauan intervensi langsung keraton Pajang maupun ancaman maritim Surabaya. Di sinilah embrio imperium Mataram Islam disemai, menunggu momentum sejarah untuk meledak dan mengklaim takhta tanah Jawa.

1.3 Runtuhnya Pajang dan Bangkitnya Alas Mentaok: Strategi Politik Ki Ageng Pemanahan dan Sutawijaya

Transisi kekuasaan dari Kesultanan Pajang ke Mataram Islam bukanlah sebuah suksesi linear, melainkan sebuah proses subversi politik yang dirancang secara cermat melalui kombinasi kesabaran strategis, pembangunan infrastruktur ekonomi independen, dan eksploitasi kelemahan struktural lawan. Pajang, di bawah kepemimpinan Sultan Hadiwijaya (Jaka Tingkir), memang

berhasil memindahkan episentrum kekuasaan ke pedalaman, namun gagal membangun fondasi birokrasi yang solid untuk mengikat para *vasal* (adipati) di pesisir dan wilayah timur.



1. Kerapuhan Struktural Pajang dan Strategi "Menunggu" Ki Ageng Pemanahan

Keraton Pajang pada dasarnya adalah entitas politik yang bergantung pada kharisma personal Sultan Hadiwijaya. H.J. de Graaf dalam analisisnya terhadap masa pemerintahan Panembahan Senopati mencatat bahwa Pajang tidak memiliki tentara reguler yang kuat dan sangat bergantung pada loyalitas para adipati bawahan. Di sinilah letak kecerdasan politik Ki Ageng Pemanahan.

Setelah menerima hibah Alas Mentaok pada kisaran tahun 1556, Pemanahan tidak melakukan manuver militer. Alih-alih memberontak, ia memilih strategi *soft power*—atau dalam terminologi Jawa dikenal sebagai *tapa* (bertapa/menahan diri). Pemanahan memobilisasi pengikutnya (para *kawula*) untuk menebang hutan, membangun sistem irigasi, dan membuka lahan sawah baru. Dalam kurang dari dua dekade, Mentaok berubah dari sebuah hutan lebat (yang secara mitologis dianggap sebagai tempat angker) menjadi pusat agraris yang mandiri secara ekonomi. Pemanahan secara efektif membangun sebuah "negara di dalam negara" (Kotagede) sambil tetap menunjukkan ketaatan formal (*seba*) ke keraton Pajang untuk menghindari kecurigaan.

2. Subversi Sutawijaya: Dekonstruksi Legitimasi Pajang

Kematian Ki Ageng Pemanahan pada tahun 1584 menandai eskalasi konflik. Putranya, Sutawijaya (yang kelak bergelar Panembahan Senopati), mengambil alih kepemimpinan Mataram dan secara radikal mengubah strategi dari koeksistensi damai menjadi konfrontasi terbuka.

Langkah subversif pertama Sutawijaya adalah menghentikan tradisi *seba* (menghadap sultan secara rutin) ke keraton Pajang. Penolakan ini bukan sekadar absennya seorang bawahan, melainkan sebuah proklamasi kemerdekaan *de facto*. Secara bersamaan, Sutawijaya mulai memperluas pengaruh Mataram dengan menundukkan wilayah-wilayah di sekitarnya seperti Kedu dan Bagelen, serta membangun benteng pertahanan (cepuri) di sekeliling Kotagede yang terbuat dari batu bata yang kokoh—sebuah infrastruktur yang mengindikasikan persiapan perang jangka panjang.

Babad Tanah Jawi melegitimasi pembangkangan ini melalui narasi teologis, di mana Sutawijaya digambarkan menerima "Wahyu Keprabon" (mandat ilahiah untuk memerintah) setelah melakukan laku spiritual di Pantai Selatan dan beraliansi dengan Kanjeng Ratu Kidul. Mitos ini secara fungsional digunakan sebagai alat propaganda psikologis untuk meruntuhkan moral pasukan Pajang yang meyakini bahwa kekuatan kosmis telah berpindah dari Pajang ke Mataram.

3. Pertempuran Prambanan (1587) dan Kemunculan Imperium Baru

Puncak eskalasi terjadi ketika Sultan Hadiwijaya akhirnya memimpin langsung invasi militer ke Mataram pada tahun 1587. Pasukan Pajang yang berjumlah masif berkemah di sekitar Prambanan. Namun, kampanye militer ini berakhir sebagai bencana bagi Pajang.

Fakta historis menunjukkan kombinasi taktik gerilya Mataram dan fenomena alam menjadi faktor penentu. Sutawijaya dilaporkan menggunakan taktik bumi hangus dan serangan malam. Lebih krusial lagi, letusan Gunung Merapi yang terjadi bersamaan dengan invasi tersebut—yang memuntahkan lahar dan memicu gempa bumi—memporak-porandakan kemah pasukan Pajang. Dalam kosmologi masyarakat Jawa abad ke-16, bencana alam ini ditafsirkan sebagai *signa* (tanda) bahwa alam semesta (makrokosmos) menolak Sultan Hadiwijaya dan merestui Sutawijaya.

Pasukan Pajang mundur dalam keadaan kacau balau. Sultan Hadiwijaya jatuh sakit dalam perjalanan pulang dan wafat tak lama kemudian. Kematian ini memicu perebutan takhta di Pajang antara Pangeran Benawa dan Arya Pangiri. Dalam kekacauan tersebut, Sutawijaya bermanuver masuk sebagai "penyelamat" bagi Pangeran Benawa, menundukkan Arya Pangiri, dan kemudian secara cerdas memindahkan pusaka-pusaka keraton (simbol legitimasi kekuasaan) dari Pajang ke Mataram.

Tahun 1587 menjadi titik nol berdirinya entitas daulat Mataram Islam. Pajang, yang tadinya merupakan majikan, direduksi statusnya hanya menjadi sebuah kadipaten bawahan (*vasal*) di bawah hegemoni Alas Mentaok.

DAFTAR PUSTAKA BAB 1

Berg, C. C. (1938). *Javaansche geschiedschrijving* [Historiografi Jawa]. In F. W. Stapel (Ed.), *Geschiedenis van Nederlandsch Indië* (Vol. 2, pp. 7-148). Joost van den Vondel.

De Graaf, H. J. (1954). *De regering van Panembahan Sénapati Ingalaga* [Pemerintahan Panembahan Senopati Ingalaga]. KITLV (Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde).

Moertono, S. (1981). *State and Statecraft in Old Java: A Study of the Later Mataram Period, 16th to 19th Century*. Monograph Series, Cornell Modern Indonesia Project. Cornell University.

Pigeaud, T. G. T., & De Graaf, H. J. (1976). *Islamic States in Java 1500-1700: Eight Dutch Books and Articles by Dr. H.J. de Graaf*. Martinus Nijhoff.

Reid, A. (1988). *Southeast Asia in the Age of Commerce, 1450-1680: Volume One: The Lands Below the Winds*. Yale University Press.

Ricklefs, M. C. (2001). *A History of Modern Indonesia since c. 1200* (3rd ed.). Stanford University Press.

Ricklefs, M. C. (2006). *Mystic Synthesis in Java: A History of Islamization from the Fourteenth to the Early Nineteenth Centuries*. Eastbridge.

BAB 2: KONSOLIDASI AWAL DAN PENEGAKAN LEGITIMASI (1587–1613)

2.1 Panembahan Senopati: Manuver Ekspansi, Legitimasi Mitos (Kanjeng Ratu Kidul), dan Realitas Militer

Naiknya Sutawijaya ke pucuk kekuasaan tertinggi di Jawa Tengah pasca-runtuhnya Pajang pada tahun 1587 menghadirkan krisis legitimasi yang akut. Berbeda dengan penguasa Demak yang masih memiliki irisan silsilah dengan Brawijaya V (Majapahit), atau Sultan Hadiwijaya (Pajang) yang menantu Sultan Trenggana, Sutawijaya berasal dari golongan *kawula* (abdi dalem/rakyat biasa). Ayahnya, Ki Ageng Pemanahan, hanyalah seorang komandan militer Pajang. Oleh karena itu, Sutawijaya menyadari bahwa kekuatan militer semata tidak akan cukup untuk menundukkan adipati-adipati pesisir dan timur yang merasa secara silsilah lebih berhak atas takhta Jawa.

Untuk mengatasi defisit genealogi ini, Sutawijaya—yang kemudian bergelar **Panembahan Senopati Ingalaga Sayidin Panatagama**—melakukan manuver politik brilian yang memadukan realitas militer agraris dengan rekayasa kosmologis tingkat tinggi.



1. Rekayasa Kosmologis: Aliansi Mitos dengan Kanjeng Ratu Kidul

Dalam historiografi modern, mitos pertemuan antara Senopati dan Kanjeng Ratu Kidul (Penguasa Laut Selatan) tidak dibaca sebagai mistisisme klenik, melainkan sebagai instrumen *statecraft* (ilmu ketatanegaraan) dan *psychological warfare* (perang urat saraf). H.J. de Graaf (1954) dan M.C. Ricklefs (2006) secara tajam menganalisis bahwa aliansi gaib ini memiliki fungsi ganda secara geopolitik dan sosiologis.

Pertama, secara geopolitik, Mataram adalah kerajaan pedalaman yang terkurung secara maritim di utara oleh hegemoni pesisir (Surabaya dan Demak). Laut Selatan (Samudra Hindia) yang berombak ganas dan tidak dapat dilayari adalah halaman belakang Mataram. Dengan mengklaim bahwa penguasa Laut Selatan adalah "istri spiritual" dan pelindung Mataram, Senopati secara efektif mengubah batas geografis yang mati menjadi benteng pertahanan psikologis. Tidak ada kerajaan pesisir utara yang berani menyerang Mataram dari arah selatan karena ketakutan terhadap bala tentara gaib Ratu Kidul.

Kedua, secara sosiologis-teologis, narasi ini adalah bentuk kompromi kultural (*mystic synthesis*). Senopati harus memerintah masyarakat agraris pedalaman yang masih sangat dipengaruhi oleh kosmologi animisme dan sisa-sisa tantrisme Hindu-Buddha. Legitimasi Islam berpusat di Giri Kedaton (Gresik), yang saat itu tidak merestui naiknya Senopati. Karena tidak mendapatkan legitimasi Islam pesisir (Sunan Giri), Senopati menciptakan legitimasinya sendiri dari rahim kebudayaan agraris pedalaman. *Babad Tanah Jawi* menyusun narasi ini sedemikian rupa sehingga penguasa alam gaib pun tunduk pada kedaulatan Mataram Islam (Ricklefs, 2006).

2. Gelar "Panembahan": Sebuah Kalkulasi Politik

Pemilihan gelar "Panembahan" (Yang Disembah/Dihormati), alih-alih "Sultan" atau "Sunan", merupakan indikasi kecerdasan diplomasi Senopati. Soemarsaid Moertono (1981) mencatat bahwa secara hierarkis, gelar Sultan pada abad ke-16 di Jawa memerlukan pengakuan atau justifikasi dari pusat otoritas Islam global (Kekhalifahan Utsmaniyah atau Syarif Makkah), atau minimal restu dari Wali Songo (Giri Kedaton).

Senopati tahu persis posisinya. Jika ia memaksakan gelar "Sultan", ia akan berhadapan langsung dengan kekuatan spiritual Sunan Giri dan koalisi militer Kesultanan Surabaya. Dengan menggunakan "Panembahan Senopati" (Panglima Perang yang Dihormati), ia memposisikan dirinya sebagai penguasa *de facto* secara militer, namun tetap "merendah" secara status teologis di hadapan otoritas Giri di timur. Gelar tambahannya, *Sayidin Panatagama* (Tuan Penata Agama), menegaskan fungsinya sebagai pelindung institusi agama Islam di wilayah kekuasaannya, tanpa mengklaim posisi sebagai pemimpin spiritual tertinggi seluruh Jawa (de Graaf, 1954).

3. Realitas Militer: Penyatuan Jawa Tengah

Di balik selubung mitos, Panembahan Senopati adalah seorang warlord (panglima perang) yang sangat pragmatis. Pasukan Mataram tidak lagi direkrut secara sukarela, melainkan mulai menerapkan embrio sistem *caca* (cacah jiwa), di mana setiap lahan pertanian wajib menyertakan jumlah pria tertentu untuk wajib militer jika negara dalam keadaan perang.

Manuver ekspansi awal difokuskan pada pengamanan episentrum Jawa Tengah. Setelah Pajang ditundukkan (1587), Senopati bergerak menghancurkan sisa-sisa loyalis Demak (1588). Ia memaksa adipati Demak, yang merasa lebih pantas menjadi raja, untuk tunduk. Ketika Demak memberontak kembali, Senopati menumpasnya tanpa ampun dan menempatkan pejabat administratif dari Mataram untuk mengontrol wilayah tersebut secara langsung. Selanjutnya, kampanye militer diarahkan ke barat laut, menundukkan wilayah Kedu, Banyumas, dan pesisir utara bagian barat, guna memastikan jalur logistik internal tidak terputus.

Penaklukan wilayah-wilayah penyangga ini bukan tanpa perlawanan keras. Namun, kombinasi antara militer Mataram yang militan (didukung surplus beras dari Alas Mentaok) dan teror psikologis dari "wahyu keprabon" yang diklaim Senopati, berhasil memaksa para penguasa lokal Jawa Tengah untuk bertekuk lutut di hadapan takhta Kotagede.

2.2 Penaklukan Wilayah Timur: Konflik Terbuka dengan Surabaya, Madiun, dan Pasuruan

Jika penaklukan wilayah Jawa Tengah oleh Panembahan Senopati bermotif pengamanan episentrum kekuasaan, maka ekspansi Mataram ke wilayah Timur (Jawa Timur) adalah sebuah keharusan geopolitik dan ekonomi absolut. Pada penghujung abad ke-16, wilayah timur Jawa tidak berada dalam kondisi vakum kekuasaan. Daerah ini dikuasai oleh aliansi adipati pesisir yang dipimpin oleh Kesultanan Surabaya (*Bangbang Wetan*).

Konflik Mataram-Surabaya bukanlah sekadar pertempuran teritorial, melainkan benturan dua peradaban sosio-ekonomi yang secara diametral bertolak belakang: Mataram merepresentasikan pedalaman agraris-militeristik, sementara Surabaya mewakili oligarki pesisir maritim-merkantilisme. B. Schrieke dalam karya klasiknya, *Indonesian Sociological Studies* (1955), menegaskan bahwa sebuah kerajaan agraris di Jawa tidak akan pernah bisa bernapas lega tanpa menguasai pelabuhan-pelabuhan pesisir yang menjadi pintu keluar surplus beras dan pintu masuk senjata api serta komoditas global.



1. Benturan Legitimasi Teologis: Mataram vs. Otoritas Giri Kedaton

Tantangan terbesar Panembahan Senopati di timur bukan hanya armada laut Surabaya yang masif, melainkan sebuah benteng pertahanan spiritual: **Giri Kedaton**. Di bawah pimpinan Sunan Giri

(Prabu Satmata), Giri Kedaton di Gresik beroperasi layaknya "Vatikan-nya" Nusantara. Otoritas Giri memegang hak prerogatif untuk memberikan legitimasi spiritual kepada raja-raja Islam di Jawa dan Kepulauan Maluku.

Giri secara tegas menolak mengakui kedaulatan Senopati. Dalam kacamata ortodoksi Islam pesisir, Panembahan Senopati dipandang sebagai *upstart* (orang baru) yang genealoginya rendah (*kawula*) dan kekuasaannya didasarkan pada kekuatan mistik-sinkretis (Ratu Kidul), bukan syariat murni warisan Wali Songo.

Fenomena polarisasi dan peperangan sesama entitas Muslim di tanah Jawa ini merupakan sebuah tragedi teologis-politik yang ironis. Keduanya merasa memegang panji Islam, namun terjerumus dalam peperangan hegemoni. Kondisi historis ini merefleksikan peringatan sosiologis dalam Al-Qur'an terkait konflik internal umat beriman [QS. Al-Hujurat: 9]:

وَأِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَت إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

“Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat dzalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat dzalim itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.” Dalam konteks praksis politik abad ke-16, konsep "duta perdamaian" gagal diwujudkan. Mataram menganggap Surabaya dan aliannya sebagai *bughat* (pemberontak/pembangkang) yang menghalangi penyatuan Jawa di bawah satu *Ulil Amri* (pemimpin tunggal). Sebaliknya, Surabaya memandang Mataram sebagai agresor penindas yang merampas kemerdekaan pelabuhan Islam yang telah berdaulat sejak era Demak.

2. Taktik Penipuan Militer di Madiun (1590)

Aliansi Timur yang menyadari ancaman ekspansi Mataram memutuskan untuk berkumpul di Madiun pada tahun 1590. Koalisi besar ini dipimpin oleh Panembahan Madiun dan didukung penuh oleh Surabaya, Pasuruan, Kediri, dan Ponorogo. Mengutip analisis H.J. de Graaf, jumlah pasukan aliansi ini jauh melampaui kapasitas militer Mataram. Jika Senopati memaksakan pertempuran frontal, Mataram dipastikan hancur.

Di sinilah Panembahan Senopati menunjukkan kejeniusannya sebagai ahli taktik makiavelis Jawa. Alih-alih menyerang, Senopati mengirimkan utusan wanita ke kemah aliansi Madiun dengan membawa pesan "takluk" dan penyerahan diri Mataram, disertai hadiah-hadiah mewah. Taktik psikologis ini berhasil melonggarkan kewaspadaan aliansi Timur. Merasa telah menang tanpa bertempur, banyak adipati sekutu yang memulangkan pasukan mereka.

Ketika pertahanan Madiun lengah dan ditinggalkan sekutunya, Senopati secara mengejutkan melancarkan serangan kilat (*blitzkrieg*) pada malam hari. Madiun jatuh tanpa perlawanan berarti. Panembahan Madiun melarikan diri ke Pasuruan, sementara putrinya, Retno Dumilah, ditawan dan kelak diperistri oleh Senopati sebagai simbol penaklukan teritorial. Jatuhnya Madiun adalah

pukulan telak yang merobek benteng pertahanan wilayah tengah-timur dan membuka jalan Mataram menuju aliran Sungai Brantas.

3. Kebuntuan di Pasuruan dan Batas Ekspansi Senopati

Setelah menundukkan Kediri (1591), mesin perang Mataram akhirnya berhadapan dengan batas maksimal kapasitas logistiknya ketika menyerang Pasuruan (1598-1599). Pasuruan, yang dilindungi oleh benteng alam dan mendapat pasokan logistik langsung dari laut melalui aliansinya dengan Surabaya dan Madura, memberikan perlawanan yang sangat alot.

Ekspedisi Pasuruan gagal mencapai kemenangan mutlak. Faktor geografis, kelelahan pasukan, dan panjangnya rantai pasokan dari Kotagede ke ujung timur Jawa membuat Mataram harus menarik mundur pasukannya. Surabaya dan Pasuruan tetap berdiri kokoh sebagai entitas independen hingga akhir hayat Senopati. Kematian Panembahan Senopati pada tahun 1601 meninggalkan pekerjaan rumah besar bagi para penerusnya: hegemoni Jawa belum sepenuhnya terwujud selama pelabuhan-pelabuhan Timur masih mengibarkan bendera perlawanan.

2.3 Era Panembahan Sedakrapyak (1601–1613): Pemberontakan Internal dan Transisi Menuju Puncak Kejayaan

Wafatnya Panembahan Senopati pada tahun 1601 membawa ujian terbesar bagi keberlangsungan Mataram: krisis suksesi. Dalam tradisi politik Jawa awal, hukum primogenitur (hak waris mutlak anak laki-laki tertua) belum melembaga secara kaku. Penunjukan Raden Mas Jolang—yang kelak bergelar Panembahan Hanyakrawati atau anumerta Panembahan Sedakrapyak—sebagai penerus takhta menyisakan residu kekecewaan di kalangan elit istana, khususnya dari saudara-saudara tirinya yang merasa lebih senior atau memiliki basis militer yang lebih kuat.

Masa pemerintahan Raden Mas Jolang (1601–1613) sering kali dianggap oleh sejarawan sebagai "periode transisional" yang terjepit di antara dua bayang-bayang besar: bapaknya sang pendiri (Senopati) dan putranya sang imperator (Sultan Agung). Namun, analisis H.J. de Graaf dalam *De regering van Panembahan Sénapati Ingalaga* (1954) dan karya lanjutannya mengenai Panembahan Sedakrapyak (1958) menunjukkan bahwa era ini justru merupakan fase paling krusial dalam menguji apakah Mataram hanyalah sebuah hegemoni militer sesaat atau sebuah institusi monarki yang tangguh.

1. Anatomi Pemberontakan: Demak dan Ponorogo

Raden Mas Jolang mewarisi sebuah imperium agraris yang belum sepenuhnya terintegrasi. Ujian pertama datang dari kakak tirinya sendiri, Pangeran Puger, yang menjabat sebagai Adipati Demak. Pada tahun 1602, Puger menolak memberikan *seba* (penghormatan formal) ke Mataram dan mendeklarasikan kemerdekaan Demak. Pemberontakan ini bukan sekadar perebutan takhta antarsaudara, melainkan representasi dari tarik-menarik antara sentralisasi pedalaman (Mataram) dan otonomi pesisir (Demak) yang secara kultural dan ekonomi merasa lebih superior.

Mataram membutuhkan waktu tiga tahun (1602–1605) untuk menumpas pemberontakan Demak. Taktik militer Mataram yang sistematis dengan memotong jalur logistik pesisir akhirnya memaksa Pangeran Puger menyerah dan diasingkan.



Belum selesai konsolidasi di pesisir utara, ancaman kedua meletus di wilayah timur (1607–1608), kali ini dipimpin oleh saudaranya yang lain, Pangeran Jayaraga, yang menjadi Adipati Ponorogo. Ponorogo adalah wilayah strategis dengan tradisi *warok* dan pasukan infantri yang tangguh. Penumpasan Jayaraga membutuhkan pengerahan militer besar-besaran yang dipimpin langsung oleh panglima-panglima senior Mataram.

Krisis suksesi berdarah ini memberikan refleksi historis tentang bahaya ambisi kekuasaan yang mengorbankan persatuan, sebuah kondisi yang jauh hari telah diperingatkan dalam Al-Qur'an terkait pentingnya soliditas [QS. Al-Anfal: 46]:

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

"Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar." Pemberontakan Puger dan Jayaraga menjadi bukti empiris bahwa absennya konstitusi suksesi yang disepakati (konsensus) menjadi titik paling rapuh dalam struktur monarki patrimonial Jawa, yang kelak terus berulang hingga keruntuhan Mataram.

2. Transisi Menuju Pelembagaan Negara dan Infrastruktur

Di sela-sela kampanye militernya, Panembahan Sedakrapyak melakukan langkah-langkah demiliterisasi bertahap menuju pelembagaan negara sipil (*state-building*). Ia menyadari bahwa

negara tidak bisa selamanya diurus dari atas pelana kuda. Raden Mas Jolang mulai membangun infrastruktur keraton yang lebih permanen, termasuk menyempurnakan Taman Danalaya dan membuat kawasan perburuan rusa (*krapyak*) di selatan keraton. Pembangunan fisik ini adalah bagian dari penciptaan kosmologi pusat (episentrum) yang megah untuk menanamkan inferioritas pada adipati bawahan.

Secara diplomasi, pada era inilah Mataram mulai melakukan kontak awal secara insidental dengan kekuatan baru dari Eropa: *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC). Hubungan awal ini belum bersifat konfrontatif, melainkan saling menjajaki kekuatan ekonomi, di mana VOC mulai menyadari adanya kekuatan monolitik di pedalaman Jawa yang mengontrol surplus beras.

3. Wafatnya Sedakrapyak dan Jalan Menuju Era Sultan Agung

Pada tahun 1613, Raden Mas Jolang wafat secara mendadak saat sedang berburu di hutan Krapyak, yang kemudian memberinya gelar anumerta "Seda ing Krapyak" (Wafat di Krapyak). Kematianya kembali memicu potensi krisis suksesi. Ia telah berjanji kepada salah satu istrinya (Ratu Tulungayu) untuk mengangkat putranya, Raden Mas Wuryah (Adipati Martapura), sebagai raja. Namun, Adipati Martapura memiliki cacat bawaan (keterbelakangan mental) yang membuatnya tidak cakap memimpin, sementara Mataram memiliki pangeran yang sangat cerdas dan ambisius dari istri yang lain, yakni Raden Mas Rangsang.

Melalui konsensus elit keraton yang cerdas demi menyelamatkan negara, Adipati Martapura dinaikkan takhta hanya selama satu hari untuk menggugurkan kewajiban janji sang ayah, sebelum kemudian "secara sukarela" menyerahkan takhta tersebut kepada kakaknya, Raden Mas Rangsang. Di tangan Raden Mas Rangsang—yang kelak bergelar Sultan Agung Hanyakrakusuma—Mataram akan meledak menjadi kekuatan imperium terbesar yang akan menggetarkan seluruh Nusantara dan mencabar hegemoni kolonial di Batavia.

DAFTAR PUSTAKA BAB 2

De Graaf, H. J. (1954). *De regering van Panembahan Sénapati Ingalaga* [Pemerintahan Panembahan Senopati Ingalaga]. KITLV.

De Graaf, H. J. (1958). *De regering van Panembahan Séda-ing-Krapjak 1601-1613* [Pemerintahan Panembahan Seda-ing-Krapyak 1601-1613]. KITLV.

Moertono, S. (1981). *State and Statecraft in Old Java: A Study of the Later Mataram Period, 16th to 19th Century*. Monograph Series, Cornell Modern Indonesia Project. Cornell University.

Ricklefs, M. C. (2001). *A History of Modern Indonesia since c. 1200* (3rd ed.). Stanford University Press.

Ricklefs, M. C. (2006). *Mystic Synthesis in Java: A History of Islamization from the Fourteenth to the Early Nineteenth Centuries*. Eastbridge.

Schrieke, B. J. O. (1955). *Indonesian Sociological Studies: Selected Writings of B. Schrieke* (Vol. 1). W. van Hoeve.

BAB 3: ERA IMPERIUM DAN PUNCAK KEJAYAAN SULTAN AGUNG (1613–1645)

3.1 Visi Penyatuan Jawa: Penaklukan Tuban, Madura, dan Penundukan Kesultanan Surabaya

Kenaikan takhta Raden Mas Rangsang pada tahun 1613 menandai dimulainya epos paling ambisius dalam sejarah Mataram Islam. Menggunakan gelar **Susuhunan Hanyakrakusuma** (kelak pada 1641 mendapat legitimasi Makkah dan bergelar **Sultan Agung Senapati Ingalaga Abdurrahman**), ia tidak lagi memandang Mataram sekadar sebagai hegemon regional, melainkan sebagai pusat jagat (*cakravartin*) dan wakil Tuhan di bumi (*khalifatullah*). Visi kosmik ini menuntut satu prasyarat mutlak yang belum berhasil diwujudkan oleh kakek dan ayahnya: penyatuan total Tanah Jawa di bawah satu payung kekuasaan absolut.

Batu sandungan terbesar bagi visi imperium ini tetaplah Kesultanan Surabaya dan aliansi pesisir timurnya. Sultan Agung menyadari bahwa Surabaya tidak bisa ditaklukkan hanya dengan keberanian prajurit infanteri; penaklukan ini membutuhkan kalkulasi logistik, pemotongan urat nadi ekonomi lawan, dan perang urat saraf yang sistematis.

1. Strategi Isolasi: Runtuhnya Sayap-Sayap Surabaya (Lasem, Pasuruan, dan Tuban)

Sultan Agung tidak langsung menyerang Surabaya. Ia belajar dari kegagalan Panembahan Senopati di Pasuruan. Memasuki dekade kedua abad ke-17, Mataram melancarkan strategi isolasi geopolitik dengan mencaplok satu per satu sekutu dan wilayah penyangga Surabaya.

Pertama, Mataram mengamankan pesisir timur yang terdekat dengan menundukkan Lasem (1616) dan membalas serangan balasan aliansi Surabaya di Siwalan, dekat Pajang. Setelah mematahkan moral pasukan timur, Mataram bergerak ke ujung timur dan berhasil meruntuhkan pertahanan Pasuruan (1617), pelabuhan strategis yang selama ini menyuplai logistik ke Surabaya dari arah tenggara.

Pukulan paling telak sebelum pengepungan Surabaya adalah jatuhnya **Tuban pada tahun 1619**. Tuban adalah pelabuhan niaga kuno dan pusat galangan kapal terbesar di Jawa sejak era Majapahit. H.J. de Graaf (1958) dalam *De regering van Sultan Agung* mencatat bahwa kejatuhan Tuban tidak hanya merampas kapasitas angkatan laut Surabaya, tetapi juga memindahkan kontrol atas rute perdagangan rempah-rempah trans-Jawa ke tangan Mataram. Tanpa Tuban dan Pasuruan, Surabaya secara efektif telah terkepung dari darat dan mulai tercekik secara maritim.

2. Kampanye Berdarah di Madura (1624)

Menyadari Surabaya masih mendapat pasokan pangan dari seberang selat, yakni Pulau Madura, Sultan Agung menginstruksikan invasi besar-besaran ke pulau karang tersebut pada tahun 1624. Ekspedisi Madura adalah salah satu kampanye militer Mataram yang paling banyak memakan

korban. Orang-orang Madura bertempur dengan kegigihan luar biasa untuk mempertahankan kemerdekaan mereka.

Meskipun menderita kerugian besar, mesin perang Mataram yang didukung cadangan demografi agraris yang masif akhirnya berhasil membumihanguskan perlawanan Madura. Untuk memastikan Madura tidak lagi memberontak, Sultan Agung merekayasa struktur politik lokal dengan menyatukan seluruh pulau di bawah satu penguasa boneka Mataram, yakni Pangeran Praseno, yang kemudian dianugerahi gelar Pangeran Cakraningrat I dan diwajibkan tinggal di keraton Mataram sebagai *vasal* sekaligus sandera politik.



3. Pengepungan Ekologis dan Penundukan Kesultanan Surabaya (1625)

Dengan runtuhnya Tuban, Pasuruan, dan Madura, Kesultanan Surabaya berdiri sendirian. Namun, kota ini dilindungi oleh tembok benteng yang sangat tebal dan dilintasi oleh sistem percabangan Sungai Brantas (Kali Mas dan Kali Pegirian) yang memastikan pasokan air bersih tak terbatas. Serangan frontal ke tembok Surabaya terbukti sia-sia dan hanya menghasilkan tumpukan mayat prajurit Mataram.

Sultan Agung kemudian menerapkan taktik pengepungan ekologis (*ecological warfare*) yang sangat brilian sekaligus brutal. Berdasarkan catatan *Dagh-Register VOC* dan historiografi Jawa (Ricklefs, 2001), pasukan Mataram dikerahkan untuk membendung aliran Sungai Brantas yang menuju ke kota. Tidak berhenti di situ, mereka membuang bangkai-bangkai binatang serta meracuni sumber-sumber air yang tersisa dengan buah aren dan bangkai.

Taktik ini memicu bencana kemanusiaan di dalam benteng. Tanpa pasokan logistik dari luar, serta meluasnya wabah kolera dan kelaparan akibat air yang beracun, pertahanan internal Surabaya

akhirnya runtuh. Pada tahun 1625, Adipati Surabaya, Pangeran Jayalengcara, akhirnya menyerah tanpa syarat kepada Tumenggung Mangun-oneng, panglima Mataram.

Penundukan Surabaya adalah pencapaian militer tertinggi dalam sejarah Mataram. Seluruh wangsa pesisir yang selama seabad lebih menjadi pusat peradaban Islam dan perdagangan internasional bertekuk lutut kepada kekuatan pedalaman. Para ulama, seniman, dan teknokrat pesisir diboyong ke Kotagede, menandai proses transfer intelektual yang kelak membentuk sintesis kebudayaan Mataram Islam pada puncaknya.

3.2 Invasi Batavia (1628 & 1629): Analisis Kritis Strategi Militer, Logistik, Wabah, dan Fakta Kegagalan

Ekspedisi militer Mataram ke Batavia pada tahun 1628 dan 1629 sering kali dinarasikan dalam historiografi nasional sekadar sebagai epos heroik perlawanan anti-kolonial. Namun, sebagai sebuah kajian sejarah akademis yang kritis, kita harus melepaskan kaca mata romantis tersebut dan membedah peristiwa ini melalui analisis struktural: strategi militer, manajemen logistik, epidemiologi, dan benturan dua paradigma geopolitik yang tidak dapat didamaikan.

1. Benturan Dua Paradigma: Kosmologi Mataram vs. Merkantilisme VOC

Pasca-penaklukan Surabaya pada 1625, Sultan Agung merasa telah mencapai posisi sebagai *cakravartin* (penguasa tunggal) tanah Jawa. Dalam sistem ketatanegaraan Mataram, tidak boleh ada entitas politik merdeka di pulau Jawa yang tidak tunduk (memberikan *seba* dan upeti) ke Kotagede. Kehadiran *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC) di Batavia (didirikan oleh Jan Pieterszoon Coen pada 1619 di atas reruntuhan Jayakarta) merupakan anomali yang merusak tatanan kosmik tersebut.

Di sisi lain, VOC bukanlah sebuah kerajaan tradisional, melainkan sebuah republik dagang multinasional bersenjata. J.P. Coen melihat Mataram murni dari kaca mata kalkulasi ekonomi; tunduk kepada Sultan Agung berarti hilangnya otonomi niaga dan monopoli. Ketika diplomasi utusan Mataram untuk menuntut ketundukan Batavia ditolak mentah-mentah oleh Coen, Sultan Agung tidak memiliki pilihan lain demi menjaga kredibilitas hegemoninya selain melancarkan perang total.

Al-Qur'an telah memberikan panduan rasional mengenai persiapan perang sebagai instrumen geopolitik (*deterrence*) bagi sebuah negara yang berdaulat:

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ

"Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu." [QS. Al-Anfal: 60].

Ayat ini menggarisbawahi prinsip mobilisasi *power* (kekuatan) yang maksimal. Sultan Agung memahami hal ini dengan memobilisasi puluhan ribu prajurit. Namun, Mataram mengabaikan satu variabel krusial: proyeksi kekuatan (*power projection*) jarak jauh membutuhkan infrastruktur logistik yang presisi.



2. Kampanye 1628: Keterkejutan Taktis dan Inferioritas Artileri

Invasi pertama pada bulan Agustus 1628 dipimpin oleh Tumenggung Baureksa (Bupati Kendal). Taktik yang digunakan Mataram adalah taktik klasik yang sukses diterapkan di Surabaya: mengepung rapat target dan memutus aliran sungai (Sungai Ciliwung) untuk mencekik suplai air Batavia.

Namun, Batavia bukan Surabaya. Batavia adalah benteng pertahanan bergaya bintang (*star fort*) ala Eropa yang dilengkapi artileri meriam berat dengan daya jangkauan dan daya hancur yang belum pernah dihadapi oleh infanteri Jawa. Selain itu, posisi Batavia yang berada di pesisir laut tidak dapat diblokade sepenuhnya oleh Mataram karena superioritas angkatan laut (kapal-kapal *Galleon*) VOC yang tetap bisa mensuplai logistik dan bantuan militer dari laut lepas.

Serangan frontal pasukan Mataram ke Redoute Hollandia (salah satu bastion VOC) berujung pada pembantaian massal akibat tembakan meriam (*grapeshot*). Ketika musim hujan tiba di bulan November, kemah-kemah prajurit Mataram terendam banjir. Kelaparan mulai melanda, dan pada bulan Desember 1628, sisa pasukan Mataram mundur dalam kondisi compang-camping.

3. Kampanye 1629: Bencana Logistik dan Serangan Wabah

Sultan Agung merespons kegagalan 1628 dengan evaluasi taktis. Ia menyadari masalah utamanya adalah logistik. Jarak tempuh Kotagede-Batavia (sekitar 500 km) tidak mungkin dilalui sambil membawa beras yang cukup untuk pengepungan berbulan-bulan. Oleh karena itu, untuk invasi kedua tahun 1629 yang dipimpin oleh Adipati Ukur dan Tumenggung Sura Agul-Agul, Mataram membangun lumbung-lumbung padi raksasa yang disamakan di Tegal dan Cirebon sebagai basis suplai (*supply chain*).

Nahasnya, intelijen VOC (diduga dengan bantuan informan lokal dari pesisir yang tidak loyal pada Mataram) berhasil mengendus titik-titik lumbung logistik tersebut. Armada VOC yang dipimpin oleh Commander Antonio van Diemen melakukan serangan laut (*amphibious raid*) dan membakar habis lumbung-lumbung padi Mataram di Tegal sebelum pasukan utama tiba di Batavia.

Ketika pasukan Mataram tiba di Batavia pada Agustus 1629, mereka sudah dalam kondisi kekurangan gizi. Selain itu, bendungan Sungai Ciliwung yang mereka buat untuk menghukum Batavia justru menjadi senjata makan tuan. Air yang tergenang di sekitar kemah Mataram di rawa-rawa pesisir menjadi sarang nyamuk malaria dan bakteri *Vibrio cholerae*.

Wabah kolera dan disentri menyapu bersih puluhan ribu prajurit Mataram tanpa VOC perlu menembakkan sebutir peluru. Dalam catatan H.J. de Graaf, jumlah prajurit Mataram yang tewas karena wabah penyakit jauh melampaui korban akibat peperangan. Peristiwa ini merupakan realitas teologis sekaligus klinis, di mana sebuah bala tentara yang besar rontok oleh kekuatan mikroskopis, sejalan dengan peringatan Nabi Muhammad SAW mengenai bahaya wabah (*Tho'un*):

إِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاغُوتِ بِالْأَرْضِ فَلَا تُدْخِلُوهَا، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضِ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا

"Jika kalian mendengar penyakit wabah (Tho'un) melanda suatu negeri, maka janganlah kalian memasukinya. Dan jika kalian berada di daerah itu, janganlah kalian keluar untuk lari darinya." (HR. Bukhari no. 5728).

Ketiadaan ilmu sanitasi dan medis di pihak Mataram menjadikan kemah militer mereka ladang pembantaian epidemiologis. J.P. Coen sendiri turut tewas secara mendadak pada September 1629 di dalam benteng Batavia, yang secara klinis juga kuat diduga akibat wabah kolera yang mencemari air sungai akibat blokade Mataram.

Kegagalan total ekspedisi 1629 memberikan dampak psikologis yang mendalam bagi keraton. Mitos bahwa kekuasaan Mataram tak terkalahkan telah retak. Sultan Agung menghukum mati beberapa panglimanya secara brutal (termasuk Tumenggung Sura Agul-Agul) karena dianggap gagal, yang justru memicu gelombang pemberontakan baru di internal Mataram pada tahun-tahun berikutnya. Kegagalan invasi Batavia menutup ambisi Mataram untuk menguasai laut dan memaksa mereka kembali mengurung diri sebagai kekuatan agraris daratan.

3.3 Transformasi Kultural dan Sains Astronomi: Penciptaan Kalender Jawa (Sinkretisme Epistemologi Saka dan Hijriah)

Kegagalan militer Mataram di Batavia (1628–1629) menghadirkan sebuah krisis eksistensial bagi keraton. Hegemoni fisik yang tak tertandingi di Jawa ternyata memiliki batas ketika berhadapan dengan superioritas teknologi dan logistik Eropa. Merespons kebuntuan militer ini, Sultan Agung tidak lantas mengendurkan cengkeraman kekuasaannya. Sebaliknya, ia memutar haluan dari penaklukan teritorial (*hard power*) menuju penaklukan kultural dan epistemologis (*soft power*).

Salah satu manuver politik-kultural paling monumental dan jenius dalam sejarah peradaban Nusantara terjadi pada tahun 1633 M: penciptaan **Kalender Jawa Islam**. Kebijakan ini bukan sekadar penyesuaian administratif matematis, melainkan sebuah rekayasa sains astronomi yang bertujuan menyatukan dua kosmologi yang saling berseberangan di tanah Jawa.



1. Dualisme Kosmologi Waktu: Konflik Pesisir dan Pedalaman

Hingga dekade ketiga abad ke-17, masyarakat Jawa hidup dalam dualisme sistem penanggalan yang merepresentasikan faksionalisme sosiologis:

- **Sistem Saka (Pedalaman/Agraris):** Masyarakat petani di pedalaman (*kejawan*) menggunakan kalender Saka yang berbasis pada peredaran matahari (*solar/syamsiyah*). Kalender warisan peradaban Hindu-Buddha ini sangat vital bagi siklus pertanian karena bulan-bulannya presisi dan selalu sinkron dengan pergantian musim kemarau dan penghujan (kelak disistematisasi lebih lanjut menjadi *Pranatamangsa*).
- **Sistem Hijriah (Pesisir/Santri):** Komunitas Islam, khususnya di wilayah pesisir utara dan basis-basis pesantren, menggunakan kalender Hijriah yang berbasis pada peredaran bulan

(*lunar/qamariyah*). Sistem ini mutlak diperlukan untuk menentukan waktu ibadah ritual, seperti awal puasa Ramadhan, Idul Fitri, dan musim Haji.

M.C. Ricklefs dalam mahakaryanya, *Mystic Synthesis in Java* (2006), menganalisis bahwa dualisme ini membahayakan integrasi Mataram. Sering kali terjadi perayaan hari besar keraton yang tidak sinkron dengan perayaan keagamaan rakyat. Bagi Sultan Agung, yang bercita-cita menjadi *Panatagama* (Pengatur Agama) sekaligus pewaris takhta Majapahit, perpecahan standar waktu ini adalah simbol terbelahnya loyalitas. Penguasaan atas "waktu" adalah bentuk tertinggi dari legitimasi politik seorang raja.

2. Rekayasa Astronomi 1633: Titik Temu Saka dan Hijriah

Pada hari Jumat Legi, bertepatan dengan tanggal 1 Sura tahun 1555 Saka (atau 1 Muharram 1043 Hijriah / 8 Juli 1633 Masehi), Sultan Agung mengeluarkan dekrit kerajaan yang mengubah total landasan epistemologis waktu di Jawa.

Rekayasa astronomi yang dilakukan keraton Mataram sangat luar biasa karena memadukan dua entitas berbeda tanpa menghancurkan salah satunya:

1. **Mengadopsi Siklus Bulan (Lunar):** Mataram secara resmi meninggalkan perhitungan matahari (solar) dan beralih menggunakan perhitungan fase bulan (lunar) murni, persis seperti kalender Hijriah Islam. Jumlah hari dalam setahun menjadi 354 atau 355 hari.
2. **Mempertahankan Angka Tahun Saka:** Alih-alih mereset angka tahun menjadi 1043 mengikuti tahun Hijriah saat itu, Sultan Agung memerintahkan agar angka tahun tetap dilanjutkan dari tahun 1555 Saka.
3. **Sinkretisasi Nomenklatur:** Nama-nama bulan Hijriah diadaptasi ke dalam lidah dan kosmologi Jawa (misal: *Muharram* menjadi *Sura*, *Shafar* menjadi *Sapar*, *Rabi'ul Awal* menjadi *Mulud*, *Ramadhan* menjadi *Pasa*, *Dzulhijjah* menjadi *Besar*). Demikian pula siklus pasaran Jawa (Pon, Wage, Kliwon, Legi, Pahing) diintegrasikan secara matematis dengan siklus tujuh hari dalam Islam (Ahad hingga Sabtu), menciptakan siklus waktu 35 hari (*selapan*) yang sangat esensial dalam ritual siklus hidup masyarakat Jawa.

Melalui modifikasi sains falak ini, keraton Mataram berhasil memaksakan sebuah "keseragaman waktu". Keputusan ini menyatukan ritme kehidupan kaum santri di pesisir dengan kaum abangan di pedalaman di bawah satu komando takwim yang dikeluarkan secara sentralistik dari Kotagede.

3. Dampak Agraris dan Kemunculan Siklus *Windu*

Meski brilian secara politis-teologis, transisi dari solar ke lunar membawa bencana administratif bagi sektor agraris. Karena kalender lunar lebih pendek sekitar 11 hari dari kalender solar, bulan-bulan dalam kalender Jawa baru ini terus bergeser menjauhi musim aslinya. Bulan *Sura* tidak lagi selalu jatuh pada musim tanam tertentu.

Untuk mengatasi disrupsi ekologis ini, para pujangga dan astronom keraton mempertahankan sistem *Pranatamangsa* (aturan musim) sebagai bayangan tak resmi di luar kalender kerajaan, khusus untuk memandu para petani agar tidak salah menebar benih. Selain itu, untuk menjaga

akurasi matematis dengan kalender Hijriah global, Mataram mengembangkan siklus 8 tahunan yang disebut **Windu** (dengan nama: *Alip, Ehe, Jimawal, Je, Dal, Be, Wawu, Jimakir*). Dalam satu windu, disisipkan tahun-tahun kabisat (*wuntu*) agar fase bulan baru tetap presisi secara astronomis.

4. Kesimpulan: Sintesis Mistik sebagai Fondasi Negara

Penciptaan Kalender Jawa adalah puncak dari apa yang disebut H.J. de Graaf sebagai "Javanisasi Islam" atau "Islamisasi Jawa". Sultan Agung secara sadar melakukan sinkretisme epistemologis. Kalender ini menjadi monumen waktu yang membuktikan bahwa Mataram Islam berhasil meramu kejeniusan sains lokal dengan kepatuhan pada syariat Islam universal. Dengan menyatukan kalender, Sultan Agung mengklaim otoritas absolutnya: ia adalah penerus para nabi yang mengatur agama, sekaligus raja dewa yang mengatur pergerakan kosmos agraris di tanah Jawa.

3.4 Sistem Agraria, Caca, dan Birokrasi Feodal Mataram: Despotisme yang Membangun Peradaban

Kejayaan militer dan pencapaian kultural Mataram pada era Sultan Agung sering kali mengaburkan realitas material yang menopangnya. Imperium ini tidak dibangun semata-mata di atas mitos *wahyu keprabon* atau heroisme kavaleri, melainkan ditopang oleh sebuah mesin birokrasi ekstraktif dan sistem eksploitasi agraria yang sangat terstruktur. Untuk mempertahankan negara yang terus-menerus berada dalam status darurat perang (*state of war*) selama hampir tiga dekade, Sultan Agung melembagakan sistem feodalisme despotik yang mengikat tanah, tenaga kerja, dan elit politik dalam satu rantai komando absolut.

1. Konsep Monarki Patrimonial dan *Tanah Lungguh*

Dalam epistemologi politik Mataram, berlaku prinsip *kagungan dalem*; yakni sebuah aksioma bahwa seluruh tanah, air, dan isinya adalah hak milik pribadi raja sebagai wakil Tuhan di bumi. Tidak ada konsep hak milik pribadi (*private property*) atas tanah bagi rakyat. Konsep ini melahirkan sistem monarki patrimonial, di mana negara dikelola layaknya rumah tangga kerajaan yang diperbesar.

Soemarsaid Moertono dalam *State and Statecraft in Old Java* (1981) menjelaskan bahwa untuk membiayai operasional negara dan pejabatnya, Mataram tidak menggunakan sistem gaji berupa uang logam (karena ekonomi moneter belum berkembang pesat di pedalaman). Sebagai gantinya, diterapkan sistem *appanage* atau **Tanah Lungguh** (tanah kedudukan). Raja meminjamkan hak pakai tanah beserta para petani yang menggarapnya kepada para *sentana* (kerabat raja) dan *priyayi/abdi dalem* (pejabat birokrasi) sebagai kompensasi atas pengabdian mereka. Para pejabat ini berhak menarik upeti berupa hasil panen dari petani, namun mereka juga wajib menyetorkan sebagian upeti tersebut beserta tenaga kerja kepada keraton.

2. Sistem *Caca* (Cacah Jiwa) sebagai Basis Ekstraksi Demografis

Unit paling fundamental dalam sistem ekonomi dan militer Mataram bukanlah luas tanah (hektare), melainkan **Caca** (cacah/keluarga petani penggarap). Satu unit *caca* merujuk pada

kesatuan tenaga kerja (kepala keluarga beserta anak istrinya) yang mampu menggarap sebidang tanah sawah dan menghasilkan surplus beras.

Sistem *caca* adalah instrumen sensus demografis sekaligus alat ekstraksi ganda yang sangat brutal namun efektif:

- **Ekstraksi Logistik:** Setiap *caca* diwajibkan menyerahkan sebagian hasil panennya kepada pejabat pemegang *lungguh*, yang kemudian disalurkan ke lumbung-lumbung keraton. Inilah yang mensubsidi kehidupan mewah keraton dan membiayai logistik jutaan ton beras untuk kampanye militer ke Surabaya hingga Batavia.
- **Ekstraksi Militer (Wajib Militer):** Setiap sejumlah *caca* tertentu diwajibkan menyetorkan pria dewasa untuk menjadi prajurit infanteri setiap kali keraton menabuh gendang perang.

B. Schrieke (1955) mencatat bahwa sistem ini menempatkan beban terberat di pundak petani bawahan (*kawula*). Mereka mengalami *corvée* (kerja paksa) untuk membangun bendungan, keraton, sekaligus menjadi umpan meriam di garis depan medan pertempuran.



3. Tata Ruang Kosmologis dan Hierarki Birokrasi Konsentris

Untuk mengontrol wilayah yang sangat luas tanpa teknologi komunikasi modern, keraton menciptakan sistem administrasi berbasis tata ruang konsentris yang menyerupai mandala:

1. **Kraton (Kutanegara):** Episentrum kekuasaan, tempat Sultan dan istananya berada.

2. **Negaragung (Negara Agung):** Wilayah inti di sekitar keraton (Mentaok, Pajang, Mataram purba) yang dikelola langsung melalui sistem *lungguh* oleh pangeran dan pejabat pusat. Daerah ini tidak memiliki bupati, melainkan dikelola oleh *bekel* (mandor tanah).
3. **Mancanegara:** Wilayah provinsi di luar inti (seperti Madiun, Kediri, Banyumas) yang dipimpin oleh Bupati (Bupati Mancanegara Timur dan Barat). Mereka adalah raja-raja kecil yang diberi otonomi, namun wajib datang ke keraton setahun sekali (*seba* pada bulan Mulud/Grebeg) untuk menyerahkan upeti dan membuktikan loyalitas.
4. **Pasisiran:** Wilayah pesisir utara (Demak, Tuban, Kendal) yang sangat diawasi karena memiliki potensi ekonomi independen dan tradisi pemberontakan. Sultan Agung menempatkan Tumenggung yang loyal dari pedalaman untuk mengawasi bupati-bupati pesisir.

4. Despotisme yang Membangun Peradaban

Dalam kacamata hak asasi manusia modern, pemerintahan Sultan Agung adalah despotisme absolut yang diwarnai teror. H.J. de Graaf mencatat berbagai insiden di mana Sultan Agung tidak segan-segan mengeksekusi mati pejabat senior, bupati, hingga pangeran yang dicurigai tidak loyal atau gagal dalam tugas kemiliteran (seperti eksekusi panglima invasi Batavia).

Namun, secara historis dan sosiologis, kekejaman dan sentralisasi yang ekstrem ini adalah "despotisme fungsional" (*functional despotism*). Di tengah lanskap Jawa yang rawan balkanisasi dan dikelilingi oleh para warlord yang saling bertikai pasca-Demak, hanya tangan besi yang mampu memaksakan integrasi. Despotisme agraris Sultan Agung berhasil menekan angka konflik horizontal antar-kadipaten, menciptakan sinkretisasi hukum dan kalender, melembagakan sastra dan kebudayaan keraton, serta membendung, setidaknya untuk sementara waktu, penetrasi kapitalisme VOC ke pedalaman Jawa.

Sistem ini berfungsi sempurna selama penguasanya memiliki kharisma dan teror psikologis sekuat Sultan Agung. Namun, ketika sang imperator wafat pada tahun 1645, ia mewariskan sebuah mesin birokrasi feodal yang terlalu berat, yang kelak akan menjadi bumerang dan mencabik-cabik Mataram di tangan para penerusnya yang lemah.

DAFTAR PUSTAKA BAB 3

De Graaf, H. J. (1958). *De regering van Sultan Agung, Vorst van Mataram, 1613-1645, en die van zijn voorganger Panembahan Séda-ing-Krapjak, 1601-1613* [Pemerintahan Sultan Agung, Penguasa Mataram, 1613-1645, dan Pendahulunya Panembahan Seda-ing-Krapyak]. KITLV.

Moertono, S. (1981). *State and Statecraft in Old Java: A Study of the Later Mataram Period, 16th to 19th Century*. Monograph Series, Cornell Modern Indonesia Project. Cornell University.

Reid, A. (1993). *Southeast Asia in the Age of Commerce, 1450-1680: Volume Two: Expansion and Crisis*. Yale University Press.

Ricklefs, M. C. (2001). *A History of Modern Indonesia since c. 1200* (3rd ed.). Stanford University Press.

Ricklefs, M. C. (2006). *Mystic Synthesis in Java: A History of Islamization from the Fourteenth to the Early Nineteenth Centuries*. Eastbridge.

Schrieke, B. J. O. (1955). *Indonesian Sociological Studies: Selected Writings of B. Schrieke* (Vol. 1). W. van Hoeve.

Schrieke, B. J. O. (1957). *Indonesian Sociological Studies: Ruler and Realm in Early Java* (Vol. 2). W. van Hoeve.

BAB 4: KEMUNDURAN DAN INTERVENSI KOLONIAL (1646–1677)

4.1 Despotisme Berdarah Amangkurat I: Sentralisasi Ekstrem, Konflik Keraton, dan Pembantaian Ulama

Wafatnya Sultan Agung pada tahun 1645 meninggalkan takhta Mataram kepada putranya, Raden Mas Sayidin, yang kemudian bergelar **Susuhunan Amangkurat I**. Berbeda dengan ayahnya yang membangun legitimasi melalui ekspansi militer dan asimilasi kultural, Amangkurat I mewarisi sebuah imperium agraris yang sangat luas namun menyimpan bom waktu fragmentasi internal. Masa pemerintahannya (1646–1677) dicatat dalam historiografi sebagai era teror negara (*state terrorism*), paranoia politik, dan despotisme berdarah yang pada akhirnya menghancurkan fondasi imperium Mataram itu sendiri.

M.C. Ricklefs (2001) dan H.J. de Graaf (1961) dalam studi ekstensifnya mengenai era ini sepakat bahwa Amangkurat I adalah seorang penguasa yang terobsesi pada sentralisasi kekuasaan absolut. Ia tidak menoleransi bentuk otonomi sekecil apa pun, baik dari para bangsawan keraton, birokrat daerah, maupun otoritas keagamaan.



1. Arsitektur Paranoia: Pemindahan Keraton ke Plered

Manifestasi pertama dari sentralisasi ekstrem dan paranoia Amangkurat I terlihat dari keputusannya memindahkan pusat pemerintahan pada tahun 1647 dari Karta (keraton kayu peninggalan Sultan Agung yang terbuka) ke **Plered**.

Secara arsitektural dan sosiologis, Plered bukanlah keraton biasa; ia adalah sebuah benteng raksasa (*citadel*) yang dikelilingi oleh tembok bata setinggi dinding pertahanan Eropa dan dikelilingi parit air yang dalam. Jika keraton Karta melambangkan raja yang membumi dan menyatu dengan rakyatnya (*kawula*), keraton Plered adalah simbol alienasi dan ketakutan sang raja terhadap rakyatnya sendiri. Amangkurat I mengurung dirinya di dalam benteng, memonopoli seluruh akses ekonomi, dan menggunakan jaringan mata-mata (intelijen) untuk mengawasi para pebesarnya.

2. Pemberontakan Pangeran Alit dan Penghancuran Faksi Senior

Paranoia Amangkurat I segera memakan korban dari kalangan elit keraton. Ia merasa terancam oleh para panglima militer senior warisan ayahnya, terutama Tumenggung Wiraguna. Melalui intrik politik yang licik, Wiraguna dikirim dalam ekspedisi militer ke timur (Blambangan) dan diam-diam dibunuh di tengah jalan pada tahun 1647.

Tindakan sewenang-wenang ini menyulut kemarahan adik kandung Amangkurat I, yakni **Pangeran Alit**. Merasa nyawanya juga terancam, Pangeran Alit melancarkan kudeta ke keraton Plered. Namun, kudeta ini digagalkan, dan Pangeran Alit tewas dalam pertempuran tersebut. Kematian Pangeran Alit bukanlah akhir dari krisis, melainkan awal dari tragedi kemanusiaan terbesar dalam sejarah Mataram.

3. Tragedi 1648: Genosida atas Jaringan Ulama Mataram

Pemberontakan Pangeran Alit didukung secara moral oleh faksi Islam puritan dan para ulama, yang memang sejak awal merasa tidak nyaman dengan gaya kepemimpinan Amangkurat I yang kejam, abai terhadap syariat, dan cenderung sekuler-despotik. Merespons hal ini, Amangkurat I melakukan pembalasan dendam yang di luar nalar kemanusiaan.

H.J. de Graaf (1961) dalam *De regering van Sunan Mangku-Rat I Tegal-Wangi*, berdasarkan kesaksian dari laporan-laporan pejabat VOC seperti Rijcklof van Goens yang berada di Mataram pada masa itu, mencatat peristiwa genosida yang mengerikan. Amangkurat I menginstruksikan orang-orang kepercayaannya untuk menyusun daftar seluruh ulama, kiai, guru ngaji, beserta keluarga mereka di wilayah yurisdiksi keraton.

Pada suatu siang di tahun 1647/1648, dengan sinyal tembakan meriam, pasukan algojo keraton melancarkan pembantaian serentak di alun-alun dan berbagai pelosok permukiman. Diperkirakan antara **5.000 hingga 6.000 ulama beserta perempuan dan anak-anak** dibantai secara sadis hanya dalam waktu kurang dari satu jam. Amangkurat I mengawasi pembantaian itu dari keratonnya, memastikan tidak ada figur spiritual yang tersisa untuk menantang otoritasnya.

Tindakan tirani berdarah ini secara teologis merupakan pelanggaran berat terhadap prinsip menjaga nyawa (*hifzh al-nafs*) dalam Islam. Al-Qur'an secara tegas melaknat pembunuhan orang-orang beriman secara sengaja demi mempertahankan kekuasaan, sebagaimana termaktub dalam Surat An-Nisa: 93:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

“Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.” [QS. An-Nisa: 93].

Dalam perspektif tafsir politik Islam, kejatuhan sebuah peradaban (Mataram) sering kali berawal dari terputusnya relasi antara *Umara* (pemimpin) dan *Ulama* (ilmuwan/pewaris nabi). Pembantaian massal ini secara efektif menghancurkan infrastruktur intelektual dan moral di pedalaman Jawa, menciptakan jurang permusuhan permanen antara kaum santri dan keraton yang kelak bergaung hingga ratusan tahun kemudian.

4. Isolasi Diplomatik dan Aliansi dengan VOC

Selain menindas rakyatnya, Amangkurat I juga mematikan otonomi pelabuhan-pelabuhan pesisir. Ia melarang pesisir berdagang secara mandiri dengan pihak luar demi memonopoli ekspor beras. Kebijakan ini mencekik nadi ekonomi kota-kota maritim dan mematikan kelas menengah pedagang Jawa (Ricklefs, 2001).

Di tengah permusuhannya dengan rakyat dan elit lokal, Amangkurat I justru mendekati kepada kekuatan kolonial. Pada tahun 1646, ia menandatangani perjanjian damai pertama dengan VOC di Batavia. Bagi Amangkurat I, VOC tidak lagi dilihat sebagai ancaman eksistensial seperti pada era ayahnya, melainkan sebagai sekutu strategis (*back-up* militer) untuk melindunginya dari ancaman pemberontakan rakyatnya sendiri. Paradoks ini menandai titik mula ketergantungan militer keraton Jawa terhadap senjata dan perlindungan kompeni Belanda.

4.2 Pemberontakan Trunojoyo dan Runtuhnya Keraton Plered: Aliansi Madura-Makassar dan Runtuhnya Mitos Kekebalan Mataram

Kediktatoran Amangkurat I yang berupaya memusatkan seluruh kekuatan ekonomi dan politik di dalam benteng Plered pada akhirnya menciptakan efek bumerang. Kebijakannya yang menindas daerah pesisir dan wilayah *mancanegara* (provinsi luar) menghasilkan akumulasi kebencian yang luar biasa. Ketika resistensi lokal itu menemukan momentum dan kepemimpinan yang tepat, Mataram menghadapi krisis eksistensial terbesarnya. Krisis ini memuncak pada dekade 1670-an melalui gerakan separatis bersenjata yang dipimpin oleh seorang bangsawan Madura, **Raden Trunojoyo**.

Pemberontakan Trunojoyo tidak dapat dipandang sekadar sebagai gejolak politik lokal Jawa-Madura. Secara historis dan geopolitik, peristiwa ini adalah titik temu dari dua krisis besar Nusantara pada abad ke-17, yang menghadirkan aliansi militer tak terduga antara faksi Madura dan para pelarian perang dari Sulawesi Selatan.

1. Formasi Aliansi Periferi: Madura dan Diaspora Makassar

Akar pemberontakan ini bersumber dari kekecewaan mendalam masyarakat Madura terhadap Mataram. Sejak penaklukan brutal oleh Sultan Agung pada 1624, Madura dipaksa tunduk dan penguasanya (keluarga Cakraningrat) diwajibkan tinggal di keraton Mataram sebagai "sandera politik". Trunojoyo, yang merupakan cicit dari Pangeran Cakraningrat I, melarikan diri dari

keraton Mataram dan kembali ke Madura pada tahun 1674 untuk mendeklarasikan perang pembebasan.

Namun, Trunojoyo menyadari bahwa kekuatan Madura saja tidak akan cukup untuk meruntuhkan Mataram. Di sinilah terjadi konvergensi geopolitik yang krusial. Mengutip analisis Leonard Y. Andaya (1981) dalam *The Heritage of Arung Palakka*, pasca-jatuhnya Kesultanan Gowa-Tallo ke tangan aliansi VOC dan Bugis (Perjanjian Bongaya 1667), ribuan prajurit Makassar yang tidak mau tunduk pada Belanda melarikan diri ke Jawa. Kelompok diaspora militer yang dipimpin oleh **Karaeng Galesong** ini adalah veteran perang yang sangat tangguh, ahli strategi maritim, dan dipenuhi dendam terhadap VOC serta sekutu-sekutunya.

Trunojoyo beraliansi dengan Karaeng Galesong (bahkan menikahkannya dengan keponakannya). Aliansi Madura-Makassar ini menciptakan mesin perang yang mematikan: infantri Madura yang militan digabungkan dengan kavaleri dan unit penembak runduk (musket) Makassar yang sangat berpengalaman. Mereka disatukan oleh sentimen Islam populis yang menentang despotisme sekuler Amangkurat I dan intervensi VOC (Ricklefs, 2001).



2. Pertempuran Gegodog (1676) dan Runtuhnya Mitos Militer Mataram

Kehancuran moral dan struktural militer Mataram akibat kebijakan paranoia Amangkurat I terbukti secara tragis dalam **Pertempuran Gegodog (1676)** di pesisir utara Jawa Timur. Untuk memadamkan pemberontakan, Amangkurat I mengirimkan pasukan raksasa Mataram yang dipimpin oleh Putra Mahkota (Adipati Anom, kelak Amangkurat II).

Menurut catatan H.J. de Graaf (1962) dalam *De regering van Sunan Mangku-Rat I Tegal-Wangi, Vol. 2*, pasukan Mataram secara kuantitas jauh lebih besar. Namun, secara kualitas, mereka adalah sekumpulan petani wajib militer (*caca*) yang kurang gizi, tidak terlatih, dan tidak memiliki

loyalitas kepada raja yang menindas mereka. Di sisi lain, pasukan Trunojoyo sangat termotivasi dan dipimpin oleh komandan-komandan lapangan yang brilian.

Di Gegodog, pasukan Mataram dihancurkan secara memalukan. Kavaleri Makassar memporak-porandakan formasi Mataram, sementara infanteri Madura menyapu sisanya. Kekalahan ini bukan sekadar kekalahan taktis, melainkan keruntuhan mitos psikologis: bala tentara Mataram yang sejak era Sultan Agung ditakuti sebagai kekuatan *invincible* (tak terkalahkan) di tanah Jawa, ternyata hanyalah macan kertas. Kekalahan ini memicu efek domino, di mana bupati-bupati pesisir utara dan Jawa Timur segera membelot dan menyatakan tunduk kepada Trunojoyo.

3. Jatuhnya Benteng Plered (1677): Simbol Runtuhnya Kosmologi Mataram

Puncak dari tragedi ini terjadi pada pertengahan tahun 1677. Pasukan gabungan Madura-Makassar menembus pedalaman Jawa Tengah dan mengepung ibukota Plered. Benteng bata raksasa yang dibangun Amangkurat I dengan mengorbankan darah dan keringat rakyatnya ternyata tidak mampu melindunginya. Ironisnya, banyak abdi dalem dan prajurit keraton yang menolak bertempur mati-matian untuk membela sang tiran.

Pada bulan Juni 1677, Plered jatuh dan dijarah habis-habisan. Harta karun keraton peninggalan Sultan Agung, emas, pusaka-pusaka keramat, hingga para perempuan keraton dirampas dan dibawa ke markas Trunojoyo di Kediri.

Kejatuhan Plered menandai titik terendah dalam sejarah dinasti Mataram. Amangkurat I, sang raja despotik yang pernah membantai ribuan ulamanya sendiri, kini harus melarikan diri di tengah malam, terusir dari takhtanya dalam kondisi sakit parah dan tanpa pasukan yang berarti. Ia berlari ke arah barat, berharap mendapatkan suaka dan bantuan militer dari VOC di Batavia.

Peristiwa ini memberikan *ibrah* (pelajaran) sejarah dan sosiologis yang sangat kuat, merefleksikan Sunnatullah bahwa kekuasaan yang dibangun di atas kezaliman tidak akan memiliki akar yang kuat di saat krisis. Hal ini sejalan dengan kaidah politik Islam klasik yang dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah: "*Allah akan menolong negara yang adil meskipun ia kafir, dan Allah tidak akan menolong negara yang zalim meskipun ia beriman.*" Keruntuhan Plered membuktikan bahwa legitimasi yang direkayasa melalui teror akan hancur oleh perlawanan kolektif dari pihak-pihak yang tertindas.

Amangkurat I akhirnya tewas dalam pelariannya pada Juli 1677 di Wanayasa, dan dimakamkan di Tegalwangi (sehingga ia sering disebut Sunan Tegalwangi). Kematianya meninggalkan takhta Mataram yang hancur lebur kepada putranya, sekaligus membuka gerbang lebar bagi intervensi militer dan politik VOC secara langsung di jantung tanah Jawa.

4.3 Perjanjian Jepara (1677) dan Pelarian Amangkurat II: Titik Balik Hilangnya Kedaulatan Mataram kepada Kompeni

Kematian Amangkurat I di Tegalwangi pada Juli 1677 di tengah pelariannya dari kejaran pasukan Trunojoyo merupakan titik nadir bagi dinasti Mataram. Takhta Mataram, yang pada era Sultan Agung menjadi pusat jagat secara kosmologis, kini diwariskan dalam kondisi hancur lebur tanpa

keraton, tanpa harta pusaka, dan tanpa bala tentara yang loyal. Penerusnya, Adipati Anom, mendeklarasikan dirinya sebagai **Susuhunan Amangkurat II** di sebuah desa nelayan di Tegal, bukan di atas singgasana emas, melainkan di bawah bayang-bayang ketakutan dan keputusan.

Dalam catatan M.C. Ricklefs (1993) pada karyanya *War, Culture and Economy in Java 1677-1726*, prosesi penobatan Amangkurat II menghadirkan ironi visual yang sangat tragis. Karena seluruh pakaian kebesaran keraton telah dijarah di Plered, Amangkurat II dinobatkan dengan mengenakan seragam laksamana angkatan laut Belanda yang dipinjamkan oleh perwira VOC. Secara semiotik, pakaian ini bukan sekadar penutup tubuh, melainkan perlambang transisi sosiopolitik yang radikal: raja Jawa tidak lagi mendapatkan legitimasinya dari *Wahyu Keprabon* (mandat ilahiah) atau otoritas ulama, melainkan dari senjata dan belas kasihan *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC).



1. Surat Permintaan Tolong dan Pergeseran Paradigma Geopolitik

Kondisi geopolitik memaksa Amangkurat II membuat keputusan yang akan mengutuk tanah Jawa selama berabad-abad berikutnya. Menyadari bahwa ia tidak memiliki kapasitas militer untuk merebut kembali keratonnya dari Trunojoyo dan Karaeng Galesong, ia secara resmi mengirimkan utusan ke Batavia untuk meminta intervensi militer VOC secara penuh.

Dalam perspektif *fiqh siyasi* (politik Islam), tindakan mengundang kekuatan asing yang memiliki agenda merkantilisme-kolonialistik untuk memerangi faksi internal (meskipun faksi tersebut memberontak) merupakan sebuah blunder fatal yang menjatuhkan kedaulatan negara. Hal ini merefleksikan peringatan sosiologis dalam Al-Qur'an mengenai bahaya menjadikan kekuatan imperialis yang eksploitatif sebagai *awliya* (pelindung/sekutu utama) demi mempertahankan kekuasaan personal [QS. Al-Ma'idah: 51]:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۚ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.” Tafsir historis dari ayat ini dalam konteks abad ke-17 di Jawa terbukti akurat: VOC (sebagai representasi entitas asing yang berorientasi pada pengerukan kapital) tidak pernah memberikan bantuan militer secara cuma-cuma. Laksamana Cornelis Speelman, komandan ekspedisi VOC yang cerdik dan oportunistis, melihat krisis Mataram bukan sebagai misi kemanusiaan, melainkan sebagai kesempatan emas untuk mereduksi Mataram dari status "Hegemon Independen" menjadi sekadar "Vasal Politik dan Sapi Perah Ekonomi."

2. Perjanjian Jepara (Oktober 1677): Kontrak Penyerahan Kedaulatan

Pada bulan Oktober 1677, di Jepara, Amangkurat II yang tidak memiliki daya tawar (*bargaining power*) dipaksa menandatangani serangkaian kontrak politik dan ekonomi dengan Cornelis Speelman. Perjanjian Jepara ini adalah dokumen yurisprudensi yang menandai kematian kedaulatan Mataram Islam secara *de jure*.

Luc Nagtegaal (1996) dalam *Riding the Dutch Tiger* membedah klausul-klausul Perjanjian Jepara yang secara sistematis mencekik leher perekonomian Mataram:

- **Monopoli Total:** VOC diberikan hak monopoli mutlak atas impor candu dan tekstil, serta ekspor beras dan gula di seluruh pelabuhan Mataram. Mataram dilarang berdagang dengan bangsa asing lainnya.
- **Gadai Teritorial:** Seluruh pendapatan dari pelabuhan-pelabuhan pesisir utara Jawa (dari Cirebon hingga ujung timur) digadaikan kepada VOC sampai seluruh biaya perang penumpasan Trunojoyo dibayar lunas oleh Mataram.
- **Penyerahan Wilayah:** Mataram harus menyerahkan wilayah Priangan, pelabuhan Semarang, dan melepaskan klaimnya atas Cirebon kepada Batavia.
- **Yurisdiksi Hukum:** Orang-orang Jawa yang memiliki hutang atau masalah hukum dengan VOC akan diadili berdasarkan hukum VOC, bukan hukum Mataram. Sebaliknya, wilayah VOC tertutup bagi intervensi hukum keraton.

3. The Debt Trap (Jebakan Utang) dan Ilusi Pembebasan

Perjanjian Jepara menginisiasi mekanisme kontrol kolonial yang jauh lebih canggih daripada sekadar penaklukan militer, yakni kontrol melalui instrumen utang negara (*sovereign debt*). Biaya pengerahan pasukan Eropa, artileri, dan armada kapal VOC untuk merebut kembali Plered dan mengejar Trunojoyo dibebankan seluruhnya kepada keraton Mataram.

Angka tagihan utang ini terus digelembungkan oleh VOC dengan bunga majemuk, sehingga mustahil bagi Amangkurat II yang miskin untuk melunasinya. Akibatnya, pelabuhan-pelabuhan

pesisir—urat nadi ekonomi yang mensubsidi pedalaman agraris—tetap berada di bawah cengkeraman VOC dari tahun ke tahun.

Ketika gabungan pasukan VOC, Amangkurat II, dan laskar-laskar sekutunya (seperti Arung Palakka yang direkrut VOC) akhirnya berhasil menangkap Trunojoyo pada tahun 1679 (yang kemudian dieksekusi langsung oleh Amangkurat II dengan tangannya sendiri), kemenangan tersebut hanyalah kemenangan semu (*pyrrhic victory*). Amangkurat II mendapatkan kembali takhtanya dan membangun keraton baru di Kartasura (1680), tetapi ia mendapati dirinya memerintah sebagai seorang raja yang terpenjara di wilayahnya sendiri.

Kedaulatan Mataram Islam, yang dibangun dengan tumpahan darah sejak era Panembahan Senopati dan mencapai puncak keemasannya di bawah Sultan Agung, kini telah diserahkan secara permanen ke meja-meja pembukuan para pedagang Kompeni Belanda. Perjanjian Jepara adalah lonceng kematian bagi otonomi pribumi, membuka era baru di mana VOC bukan sekadar mitra dagang, melainkan *Kingmaker* (Penentu Raja) yang akan terus mencampuri urusan suksesi dan mengobarkan perang saudara di tanah Jawa pada abad-abad berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA BAB 4

Andaya, L. Y. (1981). *The Heritage of Arung Palakka: A History of South Sulawesi (Celebes) in the Seventeenth Century*. Martinus Nijhoff.

De Graaf, H. J. (1961). *De regering van Sunan Mangku-Rat I Tegal-Wangi, vorst van Mataram, 1646-1677. Deel I: De ontbinding van het rijk* [Pemerintahan Sunan Amangkurat I Tegal-Wangi, Penguasa Mataram, 1646-1677. Bagian I: Disintegrasi Kerajaan]. KITLV.

De Graaf, H. J. (1962). *De regering van Sunan Mangku-Rat I Tegal-Wangi, vorst van Mataram, 1646-1677. Deel II: Opstand en ondergang* [Pemerintahan Sunan Amangkurat I Tegal-Wangi, Penguasa Mataram, 1646-1677. Bagian II: Pemberontakan dan Keruntuhan]. KITLV.

Nagtegaal, L. (1996). *Riding the Dutch Tiger: The Dutch East Indies Company and the Northeast Coast of Java, 1680-1743*. KITLV Press.

Ricklefs, M. C. (1993). *War, Culture and Economy in Java, 1677-1726: Asian and European Imperialism in the Early Kartasura Period*. Asian Studies Association of Australia in association with Allen & Unwin.

Ricklefs, M. C. (2001). *A History of Modern Indonesia since c. 1200* (3rd ed.). Stanford University Press.

Schrieke, B. J. O. (1955). *Indonesian Sociological Studies: Selected Writings of B. Schrieke* (Vol. 1). W. van Hoeve.

BAB 5: ERA KARTASURA: KONFLIK SUKSESI DAN HEGEMONI VOC (1680–1745)

5.1 Perang Suksesi Jawa I, II, dan III: Fakta Terbelahnya Dinasti Mataram dan Intervensi Asing

Pasca-runtuhnya Plered dan penandatanganan Perjanjian Jepara (1677), Susuhunan Amangkurat II memindahkan pusat pemerintahan ke Wanakarta, yang kemudian diganti namanya menjadi **Kartasura** pada tahun 1680. Secara kasat mata, perpindahan ini tampak seperti kelanjutan normal dari dinasti Mataram. Namun, secara politik dan ontologis, Keraton Kartasura adalah sebuah "negara baru" yang cacat sejak lahir. Kedaulatannya tergadai, ekonominya dihisap untuk membayar utang perang penumpasan Trunojoyo, dan untuk pertama kalinya dalam sejarah Jawa, takhta raja dilindungi oleh garnisun serdadu VOC yang bermarkas tepat di seberang keraton.

Era Kartasura dicirikan oleh instabilitas politik yang akut dan konflik berdarah yang berkepanjangan. Konflik ini bermanifestasi dalam tiga gelombang besar yang dikenal dalam historiografi sebagai **Perang Suksesi Jawa (Javanese Succession Wars)**.



1. Akar Konflik: Ketiadaan Hukum Primogenitur dan Manipulasi Kolonial

Tragedi Perang Suksesi Jawa tidak terjadi di ruang hampa. M.C. Ricklefs (1993) dalam *War, Culture and Economy in Java* mengidentifikasi dua variabel utama penyebab kehancuran internal ini:

- *Pertama*, Mataram tidak memiliki konstitusi suksesi atau hukum primogenitur (hak waris mutlak bagi putra mahkota) yang mengikat secara kaku. Setiap pangeran yang memiliki ibu dari garis keturunan bangsawan kuat atau memiliki dukungan faksi militer merasa berhak mengklaim takhta.
- *Kedua*, transisi peran VOC dari sekadar mitra dagang menjadi *Kingmaker* (Penentu Raja). VOC menyadari bahwa Mataram yang bersatu dan kuat adalah ancaman bagi monopoli komersial mereka. Oleh karena itu, Kompeni secara aktif menerapkan strategi *divide et impera* (pecah belah dan kuasai), dengan cara membiayai dan memberikan dukungan artileri kepada faksi pangeran yang paling bersedia memberikan konsesi ekonomi paling besar kepada Batavia.

Realitas historis ini merupakan contoh empiris dari apa yang digambarkan dalam Al-Qur'an mengenai bahaya perpecahan internal (faksionalisme) yang membuat sebuah bangsa tampak besar dari luar, namun keropos di dalam:

تَحْسِبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ

"...Kamu kira mereka itu bersatu, padahal hati mereka berpecah belah. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang tidak mengerti." [QS. Al-Hasyr: 14].

Kehilangan *'aqal* (pemahaman/rasionalitas) politik membuat para elit keraton Kartasura lebih memilih menghancurkan saudaranya sendiri dengan meminjam tangan pasukan asing, ketimbang membangun konsensus demi menyelamatkan kedaulatan negara.

2. Perang Suksesi Jawa I (1704–1708): Tragedi Amangkurat III dan Naiknya Pakubuwana I

Kematian Amangkurat II pada 1703 mewariskan takhta kepada putranya, Amangkurat III (Sunan Mas). Berbeda dengan ayahnya, Amangkurat III sangat anti-VOC dan berusaha melepaskan diri dari jerat utang kolonial. Ia juga memberikan suaka kepada Untung Surapati, buronan paling dicari oleh Kompeni.

Melihat Amangkurat III sebagai ancaman, VOC menolak memberikan pengakuan resmi atas penobatannya. Sebaliknya, VOC memprovokasi paman sang raja, yakni Pangeran Puger, untuk memberontak. Pada tahun 1704, di Semarang—di bawah perlindungan bayonet dan meriam VOC—Pangeran Puger dinobatkan sebagai **Susuhunan Pakubuwana I**.

Peristiwa ini menandai preseden hukum kolonial yang sangat memalukan: seorang raja Jawa mendapatkan legitimasinya bukan dari keraton, melainkan dari markas militer Belanda. Pasukan gabungan VOC dan loyalis Pakubuwana I kemudian menyerbu Kartasura. Amangkurat III terpaksa melarikan diri ke timur, tertangkap di Surabaya pada 1708, dan secara tragis diasingkan oleh VOC ke Ceylon (Sri Lanka) hingga akhir hayatnya. Sebagai bayaran atas takhta tersebut, Pakubuwana I harus menandatangani kontrak baru yang memperluas monopoli VOC dan menyerahkan wilayah Madura bagian timur serta separuh wilayah pesisir.

3. Perang Suksesi Jawa II (1719–1723): Oposisi Internal terhadap Amangkurat IV

Ketika Pakubuwana I wafat pada 1719, VOC kembali melakukan intervensi dengan menobatkan putranya sebagai **Amangkurat IV**. Penobatan yang didikte oleh pihak asing ini memicu gelombang perlawanan hebat dari faksi keraton yang lain, yakni saudara-saudara Amangkurat IV sendiri (Pangeran Blitar, Pangeran Purbaya, dan Pangeran Dipanegara) yang dibantu oleh para ulama radikal dari pesisir yang anti-Belanda.

Keraton Kartasura kembali dikepung oleh faksi pemberontak. Namun, mesin perang kompeni sekali lagi menyelamatkan raja boneka mereka. Melalui kampanye militer yang menghabiskan biaya sangat besar dari tahun 1719 hingga 1723, VOC berhasil menumpas para pangeran pemberontak dan mengasingkan mereka (termasuk ke Tanjung Harapan/Afrika Selatan).

4. Konsekuensi Berantai Menuju Suksesi III

Kemenangan VOC dalam dua Perang Suksesi pertama secara definitif mengubah status ontologis Raja Mataram. Raja di Kartasura tidak lebih dari seorang "kontraktor utama" bagi VOC, yang tugas utamanya adalah memeras keringat rakyat pedalaman untuk memenuhi kuota penyerahan wajib (ekspor beras, kayu jati, dan nila) kepada Batavia demi membayar utang militer keraton yang terus membengkak secara eksponensial.

Kondisi sosiologis yang menindas ini menciptakan bara dalam sekam yang terus memanas. Keraton kehilangan kewibawaannya di mata rakyat. Konflik yang tidak pernah benar-benar diselesaikan ini kelak akan meledak menjadi Perang Suksesi Jawa III (1746–1757) pada era Pakubuwana II—sebuah perang katastrofik yang kelak akan memecah belah Mataram secara permanen.

5.2 Untung Surapati dan Upaya Resistensi Anti-Kolonial dari Timur

Di tengah karut-marutnya elit keraton Kartasura yang terpecah belah dan semakin tunduk pada dikte Batavia, perlawanan fisik yang paling mematahkan dan terorganisir terhadap *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC) pada pergantian abad ke-17 menuju ke-18 justru tidak datang dari pangeran Mataram, melainkan dari seorang mantan budak asal Bali bernama **Untung Surapati**.

Dalam historiografi kolonial, Surapati direduksi sekadar sebagai bandit, pemberontak, dan pengacau keamanan. Namun, dalam kajian kritis modern—sebagaimana dielaborasi secara komprehensif oleh Ann Kumar (1976) dalam *Surapati, Man and Legend: A Study in Three Babad Traditions*—Surapati adalah representasi dari resistensi subaltern (kelas bawah) yang paling berhasil meruntuhkan arogansi militer Eropa di Nusantara. Perjalanannya menyingkap kelemahan struktural sistem perbudakan kolonial sekaligus keputusan diplomasi Mataram.

1. Transformasi Sosiologis: Dari Jaringan Budak Menuju Oposisi Bersenjata

Latar belakang Surapati memberikan perspektif sosiologis yang krusial tentang demografi Batavia pada abad ke-17. Ia dibawa ke Batavia sebagai budak belian dan dibesarkan di lingkungan militer

Eropa. Surapati bukan sekadar budak kasar; ia mendapatkan pelatihan militer standar Eropa, memahami taktik infanteri kompeni, dan bahkan sempat diangkat menjadi perwira pribumi dalam dinas militer VOC.

Namun, diskriminasi rasial dan ketidakadilan sistem hukum kolonial memicu desersi massal yang dipimpinnya. Surapati berbalik melawan mantan majikannya, mengumpulkan para pelarian dari berbagai etnis (Bali, Makassar, Jawa, dan Melayu), dan membentuk batalion laskar merdeka yang sangat ditakuti. Keahlian taktisnya yang memadukan disiplin tembak-menembak ala Eropa dengan gerilya lokal membuat pasukan Surapati menjadi anomali militer yang tidak mampu diatasi oleh garnisun VOC di sekitar Jawa Barat.



2. Insiden Kartasura (1686): Terbunuhnya Kapten François Tack

Manuver politik Surapati yang paling mengguncang terjadi ketika ia membawa pasukannya ke timur dan mencari suaka di Keraton Kartasura pada tahun 1686. Kehadirannya menghadirkan dilema diplomatis bagi Susuhunan Amangkurat II. Di satu sisi, Amangkurat II terikat Perjanjian Jepara untuk tunduk pada VOC. Di sisi lain, raja Mataram ini diam-diam menyimpan kebencian mendalam terhadap Kompeni yang terus memerasnya, dan melihat laskar Surapati sebagai "tentara bayaran" yang potensial untuk mengimbangi pengaruh VOC di keraton.

Batavia yang murka mengirimkan perwira senior mereka, Kapten François Tack (penakluk Trunojoyo), ke Kartasura untuk menangkap Surapati dan menagih utang Mataram. Di sinilah terjadi panggung sandiwara berdarah yang direkayasa oleh Amangkurat II dan Surapati.

Pada Februari 1686, di alun-alun Kartasura, pasukan Surapati melakukan penyerangan mendadak terhadap detasemen VOC. Kapten Tack beserta lebih dari 70 serdadu Eropa dibantai habis-habisan, sementara pasukan Mataram yang seharusnya "membantu" VOC hanya berdiri diam

menonton dari kejauhan. Kematian Kapten Tack adalah salah satu kekalahan militer paling memalukan bagi VOC di tanah Jawa (Ricklefs, 1993). Insiden ini membuktikan bahwa mitos supremasi militer kulit putih dapat dipatahkan oleh perlawanan taktis yang terorganisir.

3. Hegemoni Timur dan Berdirinya Kerajaan Pasuruan (1686–1706)

Menyadari bahwa Kartasura tidak akan mampu melindunginya selamanya dari invasi balasan VOC, Surapati bergerak semakin ke timur dan menaklukkan **Pasuruan**. Di sana, ia melepaskan identitas pelariannya dan mendeklarasikan dirinya sebagai penguasa merdeka dengan gelar **Adipati Wiranegara**.

Selama hampir dua dekade (1686–1706), Pasuruan di bawah Surapati berkembang menjadi episentrum perlawanan anti-kolonial terbesar di Nusantara. W.G.J. Rummelink (1994) dalam *The Chinese War and the Collapse of the Javanese State* mencatat bahwa Surapati berhasil membangun koalisi multietnis yang solid. Ia beraliansi dengan bupati-bupati Jawa Timur yang enggan tunduk pada Kartasura, menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan di Bali, serta menampung sisa-sisa laskar Makassar.

Lebih dari itu, Surapati meniru birokrasi Mataram dan menciptakan sistem pertahanan yang nyaris tak tertembus di ujung timur Jawa. VOC yang saat itu sedang mengalami krisis finansial tidak berani melakukan invasi militer langsung ke Pasuruan dan terpaksa membiarkan "negara merdeka" ciptaan Surapati itu eksis.

4. Keruntuhan Akibat Faksionalisme Mataram

Tragedi perjuangan Surapati adalah bahwa ia pada akhirnya tidak dihancurkan murni oleh kekuatan Belanda, melainkan terseret ke dalam pusaran Perang Sukseksi Jawa I. Ketika Amangkurat III (yang pro-Surapati) digulingkan oleh pamannya, Pakubuwana I (yang didukung penuh oleh VOC) pada 1704, Pasuruan menjadi target utama koalisi VOC-Kartasura.

Pada tahun 1706, pasukan gabungan VOC, Kartasura, dan Madura melancarkan kampanye militer masif ke Jawa Timur. Setelah pertempuran yang sangat brutal dan heroik di Bangil, Untung Surapati terluka parah dan akhirnya gugur. Untuk mencegah makamnya dibongkar oleh Belanda, para pengikutnya menyembunyikan jasadnya, mengukuhkan statusnya sebagai legenda resistensi di mata masyarakat Jawa Timur.

Kejatuhan Pasuruan dan gugurnya Surapati menandai berakhirnya ancaman militer pribumi yang independen dan terorganisir dari wilayah timur terhadap hegemoni kolonial. Gugurnya Surapati juga membuktikan bahwa perjuangan anti-kolonialisme di Jawa selalu gagal bukan karena kekurangan keberanian atau taktik, melainkan akibat aliansi faksi elit lokal (seperti Pakubuwana I) dengan kekuatan asing demi memperebutkan kekuasaan yang fana.

5.3 Geger Pecinan (1740–1743): Jatuhnya Keraton Kartasura dan Pakubuwana II

Periode Kartasura mencapai titik nadirnya bukan melalui invasi langsung dari Eropa, melainkan dari sebuah peristiwa eksodus multietnis yang dipicu oleh kebijakan rasialis kolonial di Batavia.

Peristiwa yang dikenal dalam historiografi Jawa sebagai *Geger Pecinan* (Perang Cina) ini merobek sisa-sisa terakhir dari tirai kedaulatan Mataram dan mengekspos kerapuhan psikologis serta kebangkrutan moral elit keraton, khususnya di bawah kepemimpinan Susuhunan Pakubuwana II.

W.G.J. Rummelink (1994) dalam karya monumentalnya, *The Chinese War and the Collapse of the Javanese State, 1725-1743*, menyebut insiden ini sebagai krisis terbesar yang memicu kehancuran struktural negara Jawa pramodern. Krisis ini menghadirkan aliansi sosiologis yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya: bersatunya laskar Tionghoa yang terbuang dengan para bangsawan dan petani Jawa yang anti-VOC.

1. Pembantaian Batavia (1740) dan Aliansi Tionghoa-Jawa

Akar dari Geger Pecinan bermula pada bulan Oktober 1740, ketika Gubernur Jenderal VOC, Adriaan Valckenier, memerintahkan pembantaian sistematis terhadap sekitar 10.000 etnis Tionghoa di dalam dinding kota Batavia akibat kepanikan atas melambatnya ekonomi dan isu pemberontakan. Para penyintas Tionghoa yang berhasil melarikan diri bergerak ke arah timur menyusuri pesisir utara Jawa, membawa dendam kesumat terhadap Kompeni.

Sesampainya di Jawa Tengah dan pesisir pesisiran, para pelarian Tionghoa ini disambut dengan tangan terbuka oleh faksi-faksi bangsawan Jawa dan para bupati pesisir yang juga telah lama tertindas oleh kuota eksploitasi beras VOC. Kolaborasi taktis pun terbentuk: laskar Tionghoa menyediakan keahlian membuat artileri dan militansi perang, sementara para panglima Jawa memobilisasi massa agraris (*caca*). Aliansi ini mulai menyerang loji-loji dan garnisun VOC di Rembang, Juwana, dan Jepara.

2. Oportunisme dan Kebimbangan Politik Pakubuwana II

Di Kartasura, Pakubuwana II (yang naik takhta pada 1726) dihadapkan pada dilema geopolitik yang akut. Di satu sisi, ia terikat utang dan perjanjian tunduk pada VOC. Di sisi lain, desakan dari faksi anti-kolonial di dalam keraton (dipimpin oleh Patih Natakusuma) memintanya untuk memanfaatkan momentum perlawanan Tionghoa-Jawa ini guna mengusir VOC selamanya dari tanah Jawa.

Pada awalnya, Pakubuwana II secara diam-diam mendukung aliansi tersebut dan bahkan menginstruksikan pasukannya untuk membantu pengepungan markas VOC di Semarang (1741). Namun, ketika bala bantuan militer VOC tiba dari Batavia dan memukul mundur pasukan gabungan Tionghoa-Jawa di Semarang, Pakubuwana II dilanda kepanikan yang luar biasa. Takut kehilangan takhtanya, sang raja melakukan manuver putar balik (*volte-face*): ia mengkhianati sekutu Tionghoa dan Jawa-nya, lalu memohon ampun kepada VOC, berjanji untuk kembali setia kepada Kompeni.

Sikap politik oportunistik, plin-plan, dan penuh kepura-puraan demi menyelamatkan kekuasaan personal ini secara sosiologis dan teologis merepresentasikan sindrom kemunafikan politik. Al-Qur'an mendeskripsikan secara tajam psikologi pemimpin atau golongan yang terombang-ambing tanpa prinsip yang jelas (oportunis) dalam Surah An-Nisa ayat 143:

مُذَبَّيْنٍ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَى هَؤُلَاءِ ۚ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ سَبِيلًا

“Mereka dalam keadaan ragu-ragu antara yang demikian (iman atau kafir): tidak masuk kepada golongan ini (orang-orang beriman) dan tidak (pula) kepada golongan itu (orang-orang kafir). Barangsiapa yang disesatkan Allah, maka kamu sekali-kali tidak akan mendapat jalan (untuk memberi petunjuk) baginya.” [QS. An-Nisa: 143].

Ketiadaan visi yang teguh (*mudhabdhabina*) membuat Pakubuwana II tidak dihormati oleh VOC yang menganggapnya pengecut, sekaligus dibenci secara mendalam oleh rakyat dan bangsawannya sendiri karena dianggap sebagai pengkhianat bangsa.

3. Kejatuhan Kartasura (1742) dan Pelarian Sang Raja

Pengkhianatan Pakubuwana II memicu kemarahan aliansi Tionghoa-Jawa. Di bawah pimpinan Raden Mas Garenda (seorang cucu Amangkurat III yang kala itu baru berusia 12 tahun dan diangkat menjadi raja dengan gelar **Sunan Kuning** atau Amangkurat V), pasukan pemberontak memutar arah dan menyerbu langsung ibu kota Mataram, Kartasura.

Pada bulan Juni 1742, tembok keraton Kartasura berhasil dijebol. Sejarah mencatat ironi yang getir: keraton Jawa dibumihanguskan oleh rakyatnya sendiri yang berkolaborasi dengan laskar pelarian. Pakubuwana II harus melarikan diri dari keratonnya melalui celah tembok yang hancur ke arah Ponorogo, hanya dikawal oleh segelintir pasukan VOC dan abdi dalem yang tersisa (Ricklefs, 2001). Sunan Kuning kemudian menduduki takhta, menciptakan sebuah pemerintahan transisi di mana seorang pangeran Jawa didukung oleh perwira-perwira Tionghoa.

4. Intervensi Madura, VOC, dan "Kematian" Kartasura

Kekuasaan Sunan Kuning di Kartasura tidak berlangsung lama. VOC, yang tidak ingin kehilangan raja bonekanya (Pakubuwana II), memobilisasi kekuatan penuh. Mereka juga meminta bantuan sekutu militer terkuatnya dari timur, yakni Cakraningrat IV dari Madura. Pasukan Madura-lah yang pertama kali berhasil merebut kembali reruntuhan Kartasura dari tangan pasukan Tionghoa-Jawa pada akhir 1742, sebelum akhirnya VOC "memulangkan" Pakubuwana II ke atas takhtanya pada akhir 1743.

Namun, pengembalian takhta ini harus dibayar dengan harga yang menghancurkan kedaulatan. Keraton Kartasura secara fisik telah porak-poranda. Lebih buruk lagi, secara kosmologi Jawa, sebuah keraton yang telah dijebol, dijarah, dan diduduki musuh dianggap telah kehilangan tuahnya (kehilangan *wahyu*). Kartasura sudah menjadi kota yang "mati". Kondisi psikologis dan teologis ini memaksa Pakubuwana II untuk mencari lokasi baru guna membangun keraton, yang kelak akan memindahkan pusat Mataram ke Desa Sala (Surakarta) pada tahun 1745.

5.4 Penyerahan Kedaulatan Definitif: Perjanjian 1743 sebagai Kontrak Tunduk pada VOC

Keberhasilan militer gabungan VOC dan Cakraningrat IV (Madura) merebut kembali Kartasura dari tangan laskar Tionghoa-Jawa pada akhir 1742 menyelamatkan nyawa dan takhta Susuhunan

Pakubuwana II. Namun, dalam ekologi politik kolonial, tidak ada penyelamatan tanpa kompensasi yang menghancurkan. Pengembalian takhta ini menjadi katalis bagi penandatanganan sebuah dokumen yurisprudensi yang melucuti kedaulatan Mataram hingga ke akar-akarnya.

Peristiwa ini berpuncak pada **Perjanjian 11 November 1743**, sebuah kontrak politik yang dirancang oleh Gubernur Jenderal Baron Gustaaf Willem van Imhoff. Berbeda dengan Perjanjian Jepara (1677) yang masih menyisakan ruang otonomi semu, Perjanjian 1743 adalah dekrit penyerahan kedaulatan definitif.



1. Kehilangan Akses Maritim: Pencaplokan Pasisir dan Madura

Klausul paling menghancurkan dari Perjanjian 1743 adalah aspek teritorial. Luc Nagtegaal (1996) menggarisbawahi bahwa VOC pada akhirnya menyadari bahwa membiarkan Mataram menguasai pelabuhan pesisir adalah sumber instabilitas permanen bagi perniagaan Kompeni. Oleh karena itu, melalui perjanjian ini, Pakubuwana II dipaksa menyerahkan seluruh kedaulatan atas **Pesisir Utara Jawa** (mulai dari Rembang hingga Pasuruan) dan seluruh pulau **Madura** secara permanen kepada VOC.

Dampak dari penyerahan ini sangat fatal secara geopolitik dan ekonomi. Imperium Mataram, yang pada era Sultan Agung adalah kekuatan maritim-agraris yang ditakuti, kini dipotong kakinya dan direduksi menjadi sekadar kerajaan agraris pedalaman (landlocked) yang terkurung dan terisolasi dari dunia luar. Tanpa pelabuhan, keraton kehilangan sumber pendapatan terbesarnya dari bea cukai dan perdagangan internasional, membuat mereka sepenuhnya bergantung pada sektor pertanian yang stagnan.

2. Hegemoni Birokrasi: Hak Veto Pengangkatan Patih

Jika pencaplokan teritorial menghancurkan tubuh Mataram, maka klausul administratif dari Perjanjian 1743 melumpuhkan otaknya. VOC memaksa Pakubuwana II untuk menyetujui bahwa pengangkatan **Patih** (Perdana Menteri/pejabat tertinggi di bawah raja) harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Gubernur Jenderal VOC di Batavia.

W.G.J. Rummelink (1994) menganalisis bahwa klausul ini secara efektif mengubah arsitektur kekuasaan di dalam keraton. Patih, yang seharusnya menjadi pelayan absolut raja, kini memiliki loyalitas ganda, dan sering kali lebih takut kepada Residen VOC daripada kepada Susuhunan. Dengan mengontrol Patih, VOC tidak perlu repot-repot mengurus administrasi mikro harian keraton; mereka cukup mengendalikan sang menteri untuk memastikan aliran upeti dan komoditas berjalan lancar. Raja Mataram secara *de facto* turun kasta menjadi sekadar "Bupati Utama" di bawah bayang-bayang Batavia.

3. Perpindahan ke Surakarta (1745) dan Kesimpulan Era Kartasura

Tragedi Geger Pecinan dan kehinaan Perjanjian 1743 menghancurkan moral Pakubuwana II. Istana Kartasura yang penuh puing dan ternoda oleh pendudukan musuh dianggap telah kehilangan *Wahyu Keprabon*. Dalam kosmologi Jawa, keraton yang telah dijebol musuh adalah tempat yang membawa *sial* (mala petaka) dan tidak layak lagi dipertahankan sebagai pusat jagat.

Melalui prosesi yang muram dan jauh dari kemegahan masa lalu, pada tanggal 17 Februari 1745, Pakubuwana II memindahkan pusat kerajaannya ke sebuah desa bernama Sala, di tepi Bengawan Solo, yang kemudian diberi nama **Surakarta Hadiningrat**.

Perpindahan ini menutup babak Kartasura (1680–1745)—sebuah era yang diwarnai oleh tiga perang saudara, intrik kolonial, pemberontakan budak (Surapati), dan genosida rasial (Geger Pecinan). Keraton baru di Surakarta memang berdiri, tetapi ia dibangun di atas fondasi kedaulatan yang telah hancur. Mataram telah memasuki masa senjanya, dan hanya tinggal menunggu waktu sebelum keraton ini kembali tercabik-cabik oleh perang saudara terakhir yang kelak melahirkan Palihan Nagari.

DAFTAR PUSTAKA BAB 5

Sesuai standar penulisan akademis, berikut adalah referensi literatur dan jurnal internasional yang menjadi landasan ontologis dan epistemologis untuk keseluruhan analisis pada **Bab 5 (Sub-bab 5.1, 5.2, 5.3, dan 5.4)**:

Kumar, A. (1976). *Surapati, Man and Legend: A Study in Three Babad Traditions*. E. J. Brill.

Nagtegaal, L. (1996). *Riding the Dutch Tiger: The Dutch East Indies Company and the Northeast Coast of Java, 1680-1743*. KITLV Press.

Remmelink, W. G. J. (1994). *The Chinese War and the Collapse of the Javanese State, 1725-1743*. KITLV Press.

Ricklefs, M. C. (1993). *War, Culture and Economy in Java, 1677-1726: Asian and European Imperialism in the Early Kartasura Period*. Asian Studies Association of Australia in association with Allen & Unwin.

Ricklefs, M. C. (2001). *A History of Modern Indonesia since c. 1200* (3rd ed.). Stanford University Press.

BAB 6: GIYANTI DAN PALIHAN NAGARI: BERAKHIRNYA KESATUAN MATARAM (1745–1757)

6.1 Perpindahan ke Surakarta dan Munculnya Friksi Baru

Prosesi *boyongan* (perpindahan) keraton dari Kartasura yang hancur ke Desa Sala pada tanggal 17 Februari 1745 dirancang sedemikian rupa untuk menutupi realitas politik yang sangat memalukan. Susuhunan Pakubuwana II menempati keraton barunya—yang kemudian diberi nama **Surakarta Hadiningrat**—bukan sebagai raja dari sebuah imperium yang mandiri, melainkan sebagai seorang *vasal* yang kedaulatannya telah dilucuti oleh Perjanjian 1743.

M.C. Ricklefs (1974) dalam kajian mendalamnya, *Jogjakarta under Sultan Mangkubumi 1749-1792: A History of the Division of Java*, mencatat bahwa keraton Surakarta lahir dalam kondisi "cacat bawaan". Secara psikologis, Pakubuwana II telah kehilangan legitimasi moral di mata rakyatnya; secara ekonomi, keraton kehilangan pelabuhan pesisir yang menjadi urat nadi kekayaannya; dan secara militer, pertahanan keraton sepenuhnya digantungkan pada garnisun *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC) yang berdiri congkak tak jauh dari alun-alun. Kondisi yang mencekik ini dengan cepat menjadi inkubator bagi lahirnya friksi-friksi baru yang kelak akan menghancurkan kesatuan Mataram selamanya.



1. Raden Mas Said dan Bara Dendam Suksesi

Bara api pertama yang membakar fondasi Surakarta datang dari seorang pangeran muda yang sangat karismatik dan militan, yakni **Raden Mas Said** (kelak bergelar Pangeran Sambernyawa).

Raden Mas Said adalah putra dari Pangeran Arya Mangkunegara (putra sulung Amangkurat IV). Seharusnya, ayah Said adalah pewaris sah takhta Mataram. Namun, akibat intrik keraton dan campur tangan VOC pada masa lalu, Arya Mangkunegara dibuang ke Ceylon (Sri Lanka).

Raden Mas Said tumbuh dalam bayang-bayang ketidakadilan dan kemiskinan di lingkungan keraton. Ia merasa hak sulungnya (*birthright*) telah dirampas oleh pamannya (Pakubuwana II) dan VOC. Mengumpulkan para pengikut setia ayahnya dan rakyat yang tertindas oleh pajak tinggi, RM Said keluar dari keraton dan melancarkan perang gerilya yang mematikan di wilayah Sukawati (kini Sragen). Taktik gerilya RM Said sangat merepotkan, karena ia bergerak dengan mobilitas tinggi dan mendapat dukungan luas dari kaum tani yang memandangnya sebagai representasi Ratu Adil.

2. Oportunisme Keraton dan Sayembara Sukawati

Menghadapi pemberontakan RM Said yang semakin meluas dan ketidakmampuan pasukan VOC memadamkan perang gerilya tersebut, Pakubuwana II mengeluarkan sebuah sayembara politik. Ia berjanji akan memberikan hadiah berupa tanah lungguh (*appanage*) seluas 3.000 *cacah* di Sukawati kepada siapa saja yang mampu mengusir RM Said dari wilayah tersebut.

Tantangan ini dijawab oleh adik tiri raja sendiri, yakni **Pangeran Mangkubumi**. Mangkubumi adalah seorang aristokrat yang memiliki kapasitas militer luar biasa, berkarakter tegas, dan memegang teguh nilai-nilai keperwiraan Jawa. Melalui serangkaian kampanye militer yang brilian pada awal tahun 1746, Mangkubumi berhasil memukul mundur pasukan RM Said dari Sukawati, mengamankan wilayah tersebut untuk keraton Surakarta.

3. Intervensi van Imhoff dan Pengingkaran Janji Raja

Tragedi yang menjadi pemicu keruntuhan Mataram terjadi setelah kemenangan tersebut. Ketika Mangkubumi menagih janji tanah 3.000 *cacah*, Patih Natakusuma yang pro-Belanda merasa iri dan khawatir akan meningkatnya kekuatan militer serta politik Mangkubumi. Patih ini kemudian memprovokasi Gubernur Jenderal VOC, Baron Gustaaf Willem van Imhoff, yang saat itu sedang berkunjung ke Surakarta pada tahun 1746.

Van Imhoff, seorang administrator kolonial yang arogan dan buta terhadap kepekaan tata krama politik keraton Jawa, mengintervensi urusan internal ini. Di hadapan sidang keraton (*pasewakan agung*), van Imhoff secara terbuka menegur Mangkubumi karena dianggap terlalu ambisius dan "haus tanah". Lebih memalukan lagi, Pakubuwana II tunduk pada tekanan van Imhoff dan membatalkan janjinya, memotong hadiah untuk Mangkubumi dari 3.000 *cacah* menjadi hanya 1.000 *cacah*.

4. Eksodus Mangkubumi: Titik Awal Perang Suksesi Jawa III

Bagi Pangeran Mangkubumi, insiden di *pasewakan agung* itu bukan sekadar masalah hilangnya ribuan hektar tanah agraris, melainkan sebuah penghinaan martabat (*wirang*) yang tak termaafkan. Pengingkaran janji oleh raja—ditambah dengan fakta bahwa raja Jawa secara terbuka dikendalikan

oleh seorang pejabat kafir Belanda—menghancurkan sisa-sisa kesetiaan Mangkubumi terhadap takhta Surakarta.

Dalam tradisi politik Islam dan Jawa, seorang raja yang mengingkari janjinya (*khiyanat*) dengan sendirinya menggugurkan legitimasi kepemimpinannya. Pada pertengahan Mei 1746, Pangeran Mangkubumi secara resmi meninggalkan keraton Surakarta bersama ribuan pengikut setianya. Ia tidak bergabung dengan VOC, melainkan bermanuver cerdas dengan menemui keponakannya yang menjadi musuhnya di Sukawati, yakni Raden Mas Said.

Kedua pangeran yang sebelumnya berseteru ini menyatukan dendam mereka terhadap Surakarta dan VOC. Untuk mengikat aliansi, Mangkubumi bahkan menikahkan putrinya, Raden Ayu Inten, dengan RM Said. Keluarnya Pangeran Mangkubumi dari keraton menandai dimulainya **Perang Takhta Jawa Ketiga (1746–1757)**, sebuah perang semesta yang paling destruktif dalam sejarah Mataram, yang kelak akan membelah tanah Jawa menjadi dua keraton yang saling berseteru.

6.2 Perang Mangkubuman: Strategi Gerilya Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said (Pangeran Sambernyawa)

Eksodus Pangeran Mangkubumi dari keraton Surakarta pada Mei 1746 secara drastis mengubah eskalasi politik di Jawa Tengah. Apa yang sebelumnya hanyalah pemberontakan lokal Raden Mas Said (Pangeran Sambernyawa) di wilayah Sukawati, kini bertransformasi menjadi sebuah perang semesta (*total war*) yang melibatkan seluruh lapisan sosiologis masyarakat Jawa—mulai dari pangeran, adipati mancanegara, kaum santri, hingga kaum tani pelopor (*caca*). Dalam historiografi kolonial dan nasional, periode destruktif ini dikenal sebagai **Perang Mangkubuman (1746–1757)**.

M.C. Ricklefs (1974) dalam *Jogjakarta under Sultan Mangkubumi 1749-1792* menegaskan bahwa Perang Mangkubuman adalah krisis militer dan finansial terbesar yang pernah dihadapi oleh *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC) pada abad ke-18. Perang ini tidak dapat dimenangkan oleh VOC melalui taktik militer konvensional, karena musuh yang mereka hadapi menggunakan doktrin peperangan asimetris yang sangat canggih.

1. Sinergi Taktis Dua Paradigma Kepemimpinan

Aliansi antara Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said menghadirkan kombinasi militer yang sangat mematikan bagi keraton Surakarta dan VOC.

- **Pangeran Mangkubumi** merepresentasikan legitimasi aristokratik senior. Ia memiliki wibawa, ketenangan strategis, dan pengakuan luas dari bupati-bupati *mancanegara* (provinsi luar) yang membenci Pakubuwana II. Mangkubumi bertindak sebagai *grand strategist* yang mengoordinasikan pergerakan pasukan dalam skala makro.
- **Raden Mas Said**, di sisi lain, adalah seorang komandan lapangan tempur yang jenius dan militan. Pasukannya, yang dijuluki *Sambernyawa* (Pencabut Nyawa), sangat fanatik dan ahli dalam pertempuran jarak dekat serta penyergapan maut. Ia merepresentasikan semangat puritanisme militer Jawa yang tak kenal kompromi.



2. Doktrin Perang Gerilya dan Kelumpuhan Mesin Perang VOC

Secara teknologi, pasukan Mangkubumi dan RM Said kalah jauh dari infanteri VOC yang dilengkapi senapan kopak (*musket*) dan artileri meriam lapangan. Sadar akan inferioritas ini, mereka menolak peperangan terbuka (*pitched battle*) dengan formasi berbaris ala Eropa. Sebaliknya, mereka menerapkan taktik gerilya murni: *hit-and-run* (pukul dan lari), bumi hangus, pemotongan jalur logistik, dan serangan malam.

Pasukan pemberontak memanfaatkan topografi Jawa—hutan jati yang lebat, perbukitan kapur, dan musim penghujan yang mengubah jalan raya menjadi kubangan lumpur—untuk melumpuhkan mobilitas meriam-meriam berat VOC. Ketika VOC mengirim ekspedisi besar-besaran untuk mengejar mereka, pasukan Mangkubumi akan menghilang ke dalam hutan. Namun, begitu garnisun VOC lengah atau mundur karena kehabisan ransum dan terserang wabah malaria, laskar gerilya ini akan muncul tiba-tiba untuk menghancurkan pos-pos pertahanan dan loji-loji dagang. Taktik ini secara sistematis menguras kas keuangan VOC di Batavia hingga mendekati jurang kebangkrutan.

3. Basis Sosiologis dan Dukungan Rakyat (1746–1749)

Kunci keberhasilan Perang Mangkubuman bukan sekadar pada taktik militer, melainkan pada **hegemoni sosiologis**. Perang ini sangat populer di kalangan *kawula* (rakyat jelata). Rakyat yang muak dengan korupsi para *bekel* (penarik pajak keraton) dan penderitaan akibat kuota penyerahan wajib beras kepada VOC, secara sukarela menyembunyikan pasukan Mangkubumi, memberikan informasi intelijen, dan menyuplai bahan pangan.

Di sisi lain, keraton Surakarta semakin terisolasi. Pasukan keraton banyak yang melakukan desersi dan membelot ke pihak Mangkubumi, meyakini bahwa *Wahyu Keprabon* (mandat ilahiah) telah berpindah dari Pakubuwana II kepada Mangkubumi.

4. Krisis 1749: Wafatnya Pakubuwana II dan Deklarasi Kabanaran

Titik balik politik yang paling radikal terjadi pada akhir tahun 1749. Susuhunan Pakubuwana II jatuh sakit parah. Menjelang kematiannya, dalam kondisi psikologis yang hancur dan didikte oleh kepanikan, ia menandatangani sebuah perjanjian dengan Gubernur Pantai Utara Jawa (VOC), Baron von Hohendorff. Dalam perjanjian tanggal **11 Desember 1749** itu, Pakubuwana II "menyerahkan" seluruh kedaulatan Mataram secara mutlak kepada VOC. Sebagai balasannya, VOC menobatkan putranya menjadi Pakubuwana III.

Kabar penyerahan kedaulatan ini memicu kemarahan yang luar biasa di kubu pemberontak. Sebagai respons balasan, sehari setelah deklarasi tersebut, faksi pemberontak di markas mereka di Desa Kabanaran (sebelah barat Yogyakarta saat ini) mendeklarasikan Pangeran Mangkubumi sebagai raja Mataram yang sah dengan gelar **Susuhunan Pakubuwana Senapati Ingalaga Ngabdurrahman Sayidin Panatagama** (12 Desember 1749).

Deklarasi Kabanaran menciptakan dualisme kekuasaan yang absolut: dua raja yang saling mengklaim takhta Mataram. Satu berlindung di balik tembok benteng VOC di Surakarta, dan satu lagi bergerilya di atas kuda bersama rakyatnya.

5. Retaknya Aliansi: Benih Fragmentasi Internal

Meskipun sukses besar secara militer, aliansi Mangkubumi dan RM Said menyimpan cacat genetik. Keduanya memiliki ego politik yang sama-sama besar dan merasa berhak atas takhta tertinggi. RM Said, yang merasa dirinya sebagai pewaris sah dari garis keturunan Amangkurat IV (melalui ayahnya, Arya Mangkunegara), mulai merasa tersingkirkan oleh dominasi Mangkubumi yang kini bertindak sebagai raja penuh.

Perselisihan mengenai komando militer, pembagian wilayah taklukan, dan perbedaan visi masa depan membuat hubungan mertua dan menantu ini memburuk secara drastis pada awal dekade 1750-an. Keretakan internal inilah yang kelak akan diamati dengan sangat cermat oleh para analis intelijen VOC. VOC menyadari bahwa mereka tidak bisa mengalahkan Mangkubumi dan RM Said di medan perang; satu-satunya cara untuk mengakhiri perang ini adalah dengan memecah belah aliansi tersebut melalui meja perundingan dan politik *divide et impera*.

6.3 Fakta Politik Perjanjian Giyanti (1755): Siasat *Divide et Impera* Nicolas Hartingh dan Lahirnya Kasunanan & Kasultanan

Memasuki dekade 1750-an, Perang Mangkubuman telah bermutasi menjadi perang atrisi (*war of attrition*) yang melumpuhkan semua pihak yang terlibat. Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said menguasai pedalaman, tetapi tidak mampu merebut benteng keraton Surakarta. Sebaliknya, Surakarta dan sekutu *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC)-nya terkurung dan tidak mampu menghancurkan basis gerilya pemberontak. Namun, dampak paling fatal dialami oleh

VOC. Biaya militer yang membengkak untuk menggaji serdadu bayaran Eropa dan berhentinya pasokan komoditas ekspor dari pedalaman Jawa membawa kas Kompeni di Batavia ke jurang kebangkrutan.

Dalam kondisi krisis multidimensi inilah, VOC mengirimkan seorang diplomat ulung sekaligus administrator yang sangat memahami psikologi politik Jawa: **Nicolas Hartingh**, yang diangkat sebagai Gubernur Pantai Utara Jawa (1754). Hartingh adalah sosok yang mengubah pendekatan kolonial Belanda di Jawa dari *hard power* (militeristik) menjadi *soft power* (intelijen dan diplomasi berbasis pecah-belah).



1. Analisis Intelijen Hartingh: Mengeksploitasi Retakan Internal

Melalui jaringan mata-matanya, Nicolas Hartingh mencium adanya perpecahan parah dalam kubu pemberontak. Aliansi antara Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said (Sambernyawa) telah hancur akibat benturan ego dan perebutan hegemoni komando. Puncaknya terjadi pada akhir 1752, ketika pasukan Mangkubumi dan RM Said justru saling serang secara terbuka.

M.C. Ricklefs (1974) dalam *Jogjakarta under Sultan Mangkubumi 1749-1792* mendeskripsikan secara presisi strategi Hartingh. Gubernur VOC ini menyadari bahwa selama Mangkubumi dan RM Said bersatu, VOC akan musnah dari Jawa. Oleh karena itu, ia merumuskan siasat klasik *divide et impera* (pecah belah dan kuasai): VOC harus merangkul salah satu faksi untuk menghancurkan faksi yang lain.

Hartingh memilih Mangkubumi sebagai target diplomasi karena Mangkubumi dianggap lebih rasional, memiliki basis legitimasi aristokrat yang lebih kuat, dan lebih dapat dikendalikan melalui janji pengakuan status. Sebaliknya, RM Said dianggap terlalu radikal dan tidak bisa diajak

berkompromi. Melalui perantara utusan rahasia keturunan Arab, Syekh Ibrahim, Hartingh mulai membuka saluran komunikasi rahasia dengan kubu Mangkubumi pada awal 1754.



2. Perundingan Rahasia dan Harga Sebuah Pengakuan

Proses menuju Perjanjian Giyanti bukanlah sebuah kesepakatan instan, melainkan hasil dari diplomasi rahasia yang alot. Hartingh menawarkan sebuah konsesi yang sangat menggoda bagi Mangkubumi: VOC bersedia mengakui Mangkubumi secara resmi sebagai raja dan memberikan separuh wilayah Mataram kepadanya, dengan syarat Mangkubumi harus menghentikan perang terhadap VOC, mengakui kedaulatan VOC atas wilayah pesisir, dan membantu VOC menghancurkan laskar Raden Mas Said.

Bagi Pangeran Mangkubumi, tawaran ini menghadirkan realisme politik. Ia menyadari bahwa mengusir VOC sepenuhnya dari Jawa adalah kemustahilan logistik. Menerima tawaran Hartingh berarti mengamankan takhta dan legitimasinya, meskipun harus dibayar dengan membelah tanah leluhurnya dan memerangi mantan menantunya sendiri. Setelah serangkaian pertemuan (termasuk pertemuan tatap muka antara Hartingh dan Mangkubumi di Pedagangan, Grobogan, pada September 1754), kerangka kesepakatan pembagian Mataram akhirnya disetujui. Susuhunan Pakubuwana III di Surakarta—raja boneka VOC yang lemah—tidak memiliki pilihan lain selain menandatangani persetujuan untuk menyerahkan separuh kerajaannya.

3. *Palihan Nagari* (13 Februari 1755): Kematian Mataram sebagai Entitas Tunggal

Klimaks dari konspirasi politik ini terjadi di sebuah desa kecil bernama Giyanti (sebelah tenggara Surakarta) pada tanggal **13 Februari 1755**. Di bawah tenda perundingan yang dijaga ketat, ditandatangani dokumen bersejarah yang dikenal sebagai **Perjanjian Giyanti**.

Peristiwa ini dalam tradisi Jawa dikenal sebagai **Palihan Nagari** (Pembelahan Negara). Klausul utamanya secara permanen mengubah peta demografi dan politik Jawa:

- **Pembagian Teritorial:** Wilayah *Negaragung* (inti) dan *Mancanegara* (provinsi luar) Mataram dibelah menjadi dua bagian yang relatif seimbang secara ekonomi dan cacah penduduk.
- **Pengakuan Takhta:** Pangeran Mangkubumi diakui sebagai raja merdeka dengan gelar **Sultan Hamengkubuwana I** (secara resmi: *Ngabdurrahman Sayidin Panatagama Khalifatullah*).
- **Pendirian Keraton Baru:** Hamengkubuwana I segera membangun keraton baru di wilayah Hutan Beringan, yang kemudian menjadi Kasultanan **Yogyakarta Hadiningrat** (pembangunan dimulai secara masif pada 1756).

4. Konsekuensi Kosmologis dan Hegemoni Permanen Kolonial

Penandatanganan Perjanjian Giyanti adalah kemenangan diplomasi terbesar VOC di Nusantara. Tanpa membuang banyak peluru, Nicolas Hartingh berhasil menetralsir ancaman eksistensial terhadap Batavia. Lebih dari itu, penciptaan dua kerajaan yang saling bersaing (Surakarta dan Yogyakarta) secara sengaja didesain untuk mencegah bangkitnya kembali kekuatan militer Jawa yang bersatu.

Secara kultural dan kosmologis, Perjanjian Giyanti adalah tragedi yang meruntuhkan konsep *cakravartin* (pusat jagat tunggal) dalam filsafat ketatanegaraan Jawa. Keraton tidak lagi menjadi pusat mikrokosmos yang utuh. Keduanya, baik Kasunanan Surakarta maupun Kasultanan Yogyakarta, sejak saat itu menghabiskan energi mereka bukan untuk melawan penjajahan, melainkan untuk bersaing satu sama lain dalam hegemoni kebudayaan—seperti adu megah arsitektur keraton, penyempurnaan tari-tarian, desain batik, hingga rivalitas literatur pewayangan.

Mataram Islam, imperium besar yang dirintis dengan darah oleh Panembahan Senopati dan dibawa ke puncak kejayaan oleh Sultan Agung, secara *de jure* dan *de facto* menemui ajalnya di meja perundingan Giyanti.

6.4 Perjanjian Salatiga (1757): Lahirnya Mangkunegaran dan Fragmentasi Total Mataram Islam

Perjanjian Giyanti (1755) memang berhasil meredakan sebagian besar badai Perang Mangkubuman dengan mengakomodasi ambisi Pangeran Mangkubumi, tetapi ia tidak membawa perdamaian absolut. Di luar tembok keraton Surakarta dan keraton Yogyakarta yang baru dibangun, masih ada satu faksi militer yang menolak untuk menyerah: laskar gerilya di bawah pimpinan Raden Mas Said (Pangeran Sambernyawa).

Pasca-Giyanti, RM Said mendapati dirinya berada dalam posisi yang secara logistik dan strategis sangat terdesak. Ia kini harus menghadapi koalisi tiga kekuatan sekaligus: Kasunanan Surakarta, kekuatan kolonial VOC, dan mantan mertua sekaligus sekutunya, Kasultanan Yogyakarta. Namun, alih-alih hancur, dua tahun periode pasca-Giyanti (1755–1757) justru menjadi pembuktian

supremasi taktis Raden Mas Said yang pada akhirnya memaksa VOC kembali ke meja perundingan.



1. *Tiji Tibèh* dan Perang Semesta Melawan Tiga Front

M.C. Ricklefs (1974) mencatat bahwa meskipun terisolasi, pasukan RM Said memiliki kohesi moral yang tidak dimiliki oleh tentara bayaran VOC maupun pasukan keraton yang baru terbelah. RM Said menanamkan doktrin egaliter militeristik yang dikenal dengan semboyan *Tiji Tibèh* (*Mati siji mati kabèh, mukti siji mukti kabèh* — Mati satu mati semua, makmur satu makmur semua). Doktrin ini menghapus jarak antara komandan aristokrat dan prajurit akar rumput, menciptakan loyalitas buta yang sangat ditakuti.

Sepanjang tahun 1755 hingga 1756, laskar Sambernyawa melancarkan serangan-serangan bunuh diri yang brilian. Mereka membakar loji-loji VOC, memporak-porandakan wilayah pinggiran Surakarta, dan bahkan hampir berhasil menembus pertahanan keraton Yogyakarta yang sedang dibangun. Dalam Pertempuran Hutan Sitakepyak, pasukan kavaleri RM Said berhasil memukul mundur pasukan gabungan VOC dan Mataram, memberikan pesan politik yang jelas: kekuatan RM Said tidak dapat dimusnahkan secara militer.

2. Kebuntuan Militer dan Inisiasi Perjanjian Salatiga

Sama halnya dengan logika yang melahirkan Perjanjian Giyanti, para pejabat VOC di Semarang menyadari bahwa perang yang berlarut-larut ini menelan biaya yang tak sanggup lagi mereka tanggung. Di sisi lain, Pakubuwana III di Surakarta sangat kelelahan menghadapi teror sepuhnya tersebut. Hamengkubuwana I di Yogyakarta pun secara pragmatis lebih memilih fokus membangun keratonnya daripada terus memburu RM Said di hutan-hutan.

Kelelahan kolektif ini mendorong VOC untuk kembali menjadi mediator diplomasi. Kali ini, VOC menekan Pakubuwana III agar bersedia memberikan konsesi wilayah demi mengamankan perdamaian. Setelah melalui negosiasi yang alot, RM Said akhirnya bersedia meletakkan senjata, asalkan ia diberikan wilayah otonom dan status kebangsawanan yang setara dengan pengorbanannya.

3. Fragmentasi Tiga Kutub: Fakta Politik Perjanjian Salatiga

Pada tanggal **17 Maret 1757**, di sebuah benteng VOC di Salatiga, sebuah kontrak politik yang menandai fragmentasi definitif Mataram ditandatangani. Perjanjian Salatiga menyepakati beberapa klausul struktural:

- **Penyerahan Wilayah:** Raden Mas Said diberikan wilayah otonom seluas 4.000 *cacah* (keluarga petani penggarap) yang diambil dari sebagian wilayah kekuasaan Kasunanan Surakarta (meliputi wilayah Keduwang, Matesih, Gunungkidul bagian utara, dan Pajang bagian utara).
- **Gelar dan Status Otonomi:** RM Said diangkat sebagai pangeran merdeka dengan gelar **Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya (KGPA) Mangkunegara I**.
- **Batas Entitas (Principality):** Untuk menjaga supremasi Kasunanan dan Kasultanan, wilayah Mangkunegaran tidak berstatus sebagai kerajaan penuh, melainkan kadipaten agung (principality). Mangkunegara I tidak berhak menyandang gelar Sunan atau Sultan, tidak berhak memiliki *alun-alun* dengan sepasang beringin kurung, dan dilarang memiliki balai *sitihinggil* (tempat duduk takhta yang ditinggikan).

Meskipun secara seremonial ditempatkan sedikit di bawah keraton utama, Kadipaten Mangkunegaran secara *de facto* adalah entitas politik dan ekonomi yang berdaulat, memiliki tentara sendiri (Legiun Mangkunegaran yang sangat modern kelak pada abad ke-19), dan administrasi yang mandiri.

4. Epilog Bab 6: Lonceng Kematian Imperium Mataram

Perjanjian Salatiga (1757) adalah paku terakhir pada peti mati Imperium Mataram Islam. Hegemoni politik Jawa yang dulu dipersatukan dengan darah dan air mata oleh Panembahan Senopati dan Sultan Agung, kini telah terpecah menjadi tiga faksi: Surakarta, Yogyakarta, dan Mangkunegaran. (Kelak pada 1813, Inggris akan memecahnya lagi menjadi empat dengan lahirnya Pakualaman di Yogyakarta).

Siasat kolonialisasi melalui fragmentasi yang diterapkan VOC terbukti sukses secara permanen. Sejak tahun 1757, para penguasa Jawa kehilangan orientasi geopolitik untuk mengusir penjajah. Energi mereka habis tersedot untuk mengawasi satu sama lain, memperebutkan wilayah *mancanegara* yang tersisa, dan bersaing dalam hegemoni kebudayaan (tari, sastra, dan tata rias busana). Perjanjian Salatiga bukan sekadar dokumen perdamaian, melainkan piagam yang melegitimasi *Pax Neerlandica* (Kedamaian di bawah Belanda) di tanah Jawa, yang akan bertahan hingga runtuhnya Hindia Belanda pada pertengahan abad ke-20.

DAFTAR PUSTAKA BAB 6

Houben, V. J. H. (1994). *Kraton and Kumpeni: Surakarta and Yogyakarta, 1830-1870*. Leiden: KITLV Press.

Kumar, A. (1980). *Javanese Historiography in and of the "Colonial Period": A Case Study*. In A. Reid & D. Marr (Eds.), *Perceptions of the Past in Southeast Asia* (pp. 187-206). Singapore: Heinemann Educational Books.

Moertono, S. (1981). *State and Statecraft in Old Java: A Study of the Later Mataram Period, 16th to 19th Century*. Ithaca, NY: Cornell Modern Indonesia Project, Southeast Asia Program, Cornell University.

Rommelink, W. G. J. (1994). *The Chinese War and the Collapse of the Javanese State, 1725-1743*. Leiden: KITLV Press.

Ricklefs, M. C. (1974). *Jogjakarta under Sultan Mangkubumi 1749-1792: A History of the Division of Java*. London: Oxford University Press.

Ricklefs, M. C. (2001). *A History of Modern Indonesia since c. 1200* (3rd ed.). Stanford, CA: Stanford University Press.

BAB 7: EPILOG: WARISAN DAN ANALISIS KRITIS

7.1 Mengapa Imperium Agraris Jawa Runtuh?: Analisis Struktural dan Kultural

Berakhirnya kesatuan Mataram Islam melalui Palihan Nagari (Perjanjian Giyanti 1755) dan Perjanjian Salatiga (1757) sering kali direduksi dalam buku-buku teks sejarah sekadar sebagai akibat dari kelicikan siasat *divide et impera* (pecah belah dan kuasai) yang dijalankan oleh *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC). Kendati intervensi kolonial memainkan peran esensial sebagai katalisator, analisis historis yang kritis dan berdimensi struktural—sebagaimana diajukan oleh sejarawan strukturalis seperti B. Schrieke dan Denys Lombard—menunjukkan bahwa keruntuhan Mataram sejatinya berakar dari kelemahan internal (genetik) imperium itu sendiri.

Imperium agraris ini runtuh bukan semata-mata karena dikalahkan dari luar, melainkan karena ia melapuk dari dalam akibat kontradiksi struktural, institusional, dan kultural.

1. Isolasi Geopolitik: Kegagalan Menyatukan Agraris dan Maritim

Kegagalan paling fundamental Mataram adalah ketidakmampuannya mengintegrasikan kekuatan pedalaman (agraris) dengan kekuatan pesisir (maritim). Ketika Sultan Agung menaklukkan pelabuhan-pelabuhan pesisir utara (Tuban, Pasuruan, Surabaya), ia tidak mentransformasikan Mataram menjadi negara maritim. Sebaliknya, ia mematkan otonomi pelabuhan tersebut, membakar kapal-kapal dagang pesisir untuk mencegah pemberontakan, dan memaksa para pedagang laut beralih menjadi birokrat agraris.

Denys Lombard dalam *Nusa Jawa: Silang Budaya* (1990) menyebut fenomena ini sebagai "bunuh diri maritim" (*suicide maritime*). Ketika Mataram memutus aksesnya dari rute perdagangan maritim global (Jalur Sutra Maritim), mereka kehilangan akses terhadap teknologi (terutama senjata api dan artileri modern) dan inovasi pemikiran dari dunia luar. Akibatnya, ketika dihadapkan pada VOC yang merepresentasikan kapitalisme merkantil global yang didukung kekuatan laut tak terbatas, Mataram hanyalah raksasa daratan yang terisolasi dan mudah dicekik secara logistik.

2. Penyakit Institusional: Absennya Hukum Primogenitur dan Sistem Birokrasi Patrimonial

Secara politik, Mataram adalah "monarki patrimonial" di mana negara dikelola layaknya harta kekayaan pribadi raja. Seluruh tanah dan bawahan adalah milik raja (*kagungan dalem*). Soemarsaid Moertono (1981) mencatat bahwa sistem ini tidak membangun birokrasi modern yang rasional, melainkan birokrasi patron-klien yang mengandalkan kesetiaan personal. Jika raja yang berkuasa kuat dan menakutkan (seperti Sultan Agung), negara akan utuh. Namun jika raja lemah, para birokrat daerah (bupati *mancanegara*) akan segera melepaskan diri.

Kelemahan ini diperparah dengan tidak adanya konstitusi suksesi yang disepakati (*primogeniture*). Ketiadaan aturan baku mengenai siapa putra mahkota yang paling berhak (apakah dari permaisuri

pertama, atau yang ditunjuk oleh raja) membuat setiap pangeran merasa berhak atas takhta. Hal ini menciptakan lanskap di mana faksionalisme dan perang saudara adalah keniscayaan setiap kali seorang raja mangkat (Perang Suksesi I, II, dan III).

3. Erosi Legitimasi Teologis dan Sosiologis

Di era awal (Panembahan Senopati dan Sultan Agung), kekuasaan Mataram ditopang oleh legitimasi sosiologis yang kuat: raja dipandang sebagai *khalifatullah* sekaligus pemegang *Wahyu Keprabon*. Raja adalah pengayom rakyat dan pelindung agama. Namun, memasuki era Amangkurat I dan para penerusnya, kekuasaan dijalankan melalui teror, despotisme, dan penindasan ekonomi (pajak *cacah* yang mencekik).

Tragedi pembantaian ribuan ulama pada era Amangkurat I dan keputusan keraton Kartasura untuk menjadi "klien" politik VOC (sebuah kekuatan kafir yang memeras pribumi) menghancurkan legitimasi teologis keraton di mata kaum santri dan rakyat akar rumput.

Dalam perspektif hukum kausalitas sejarah dalam Islam (*Sunnatullah*), kehancuran sebuah entitas kekuasaan sering kali berawal dari kerusakan moral dan kezaliman struktural yang dilakukan oleh elit penguasa (oligarki) itu sendiri. Al-Qur'an secara eksplisit menggarisbawahi dalil sosiologis ini:

وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُنْثَرِفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاَهَا تَدْمِيرًا

“Dan jika Kami hendak membinasakan suatu negeri, maka Kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (supaya mentaati Allah) tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan (ketentuan Kami), kemudian Kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya.” [QS. Al-Isra: 16].

Gaya hidup hedonis elit keraton yang dibiayai oleh penderitaan kaum tani, ditambah dengan kolaborasi mereka bersama penjajah demi mempertahankan takhta yang semu, adalah bentuk *kefasikan* politik yang dicatat oleh sejarah. Keruntuhan Mataram membuktikan bahwa militer sebesar apa pun tidak akan mampu mempertahankan kedaulatan jika sebuah negara telah kehilangan ikatan moral dengan rakyatnya.

4. Kesimpulan Struktural

Runtuhnya kesatuan Mataram Islam adalah hasil akhir dari eklips (gerhana) rasionalitas bernegara. Elit Jawa terjebak dalam mitos kebesarannya sendiri, menolak beradaptasi dengan perubahan tata dunia global (merkantilisme Eropa), gagal membangun institusi hukum bernegara yang solid, dan akhirnya menghancurkan diri mereka sendiri melalui pertumpahan darah antarsaudara yang pada akhirnya hanya menguntungkan neraca keuangan kompeni Belanda.

7.2 Dampak Palihan Nagari terhadap Sosio-Kultural, Identitas, dan Hukum Islam di Jawa

Peristiwa *Palihan Nagari* (Pembelahan Negara) melalui Perjanjian Giyanti (1755) dan Salatiga (1757) tidak hanya mendemarkasi ulang peta politik dan demografi di Jawa Tengah, tetapi juga

memicu gempa tektonik pada ranah sosiologis, kultural, dan teologis. Ketika saluran agresi militer dan ambisi geopolitik tertutup rapat oleh hegemoni *Pax Neerlandica* (Kedamaian di bawah Belanda), energi keraton yang melimpah mengalami reorientasi secara radikal. Mataram Islam bertransformasi dari sebuah mesin perang ekspansif menjadi apa yang oleh Clifford Geertz kelak dikonseptualisasikan sebagai *Theater State* (Negara Teater)—sebuah entitas politik yang obsesif terhadap ritual, simbolisme, dan hierarki kebudayaan sebagai kompensasi atas hilangnya kekuasaan nyata.

Dampak struktural ini melahirkan diferensiasi identitas yang sangat tajam dan mendomestikasi peran Islam dalam ruang publik Jawa.

1. Involusi Kultural dan Munculnya *Theater State*

Tertutupnya akses keraton terhadap laut dan terisolasinya mereka di pedalaman menciptakan fenomena "involusi kultural". Nancy K. Florida (1995) dalam *Writing the Past, Inscribing the Future*, menganalisis bahwa keraton Surakarta (dan kemudian Yogyakarta) mulai mengalihkan medan pertempurannya dari arena militer ke arena kesusastraan dan estetika.

Puncak dari involusi ini adalah era **Sintesis Yosodipuran** di Surakarta, di mana para pujangga keraton (seperti Yosodipuro I, II, hingga kelak Ronggowarsito) memproduksi secara massal karya-karya sastra (seperti *Serat Centhini*, *Serat Wedhatama*) yang mengawinkan tasawuf Islam dengan kebatinan Jawa-Hindu. Di era inilah tata krama bahasa Jawa (*unggah-ungguh boso*) diciptakan dan disistematisasi secara ekstrem (terbagi menjadi *ngoko*, *krama madya*, *krama inggil*). Hierarki bahasa ini sengaja diciptakan oleh keraton yang secara politik telah impoten, untuk secara ilusionis mempertahankan jarak kasta antara raja yang mulia dan rakyat jelata, meskipun nyatanya sang raja hanyalah bawahan dari Residen Belanda.

2. Diferensiasi Identitas: Kosmopolitanisme Surakarta vs. Puritanisme Yogyakarta

Secara sosiologis, pembelahan Mataram memicu kontestasi identitas yang sengit antara dua pewarisnya, yang secara visual dan filosofis sengaja dibuat berbeda demi menegaskan eksistensi masing-masing (Ricklefs, 1974).

- **Surakarta (Kasunanan):** Karena lebih lama berinteraksi dengan VOC dan memiliki sejarah keraton yang lebih tua, Solo berkembang menjadi keraton yang lebih kosmopolitan, lentur, dan kompromistis. Kebudayaan Solo (tari, batik, karawitan) cenderung lebih halus (*alus*), romantis, dan rumit secara estetika.
- **Yogyakarta (Kasultanan):** Didirikan oleh Pangeran Mangkubumi (Sultan Hamengkubuwana I) yang merupakan seorang panglima perang gerilya, Jogja membangun identitasnya di atas fondasi militerisme dan puritanisme agraris. Estetika Jogja cenderung lebih kaku, gagah (*gagah*), dinamis, dan konservatif. Hal ini terlihat jelas dari bentuk *blangkon*, motif batik yang tegas, hingga postur tarian keraton yang menyerupai gerakan bela diri.

Perpecahan kultural ini adalah monumen abadi dari keberhasilan politik *divide et impera*, sebuah realitas sosiologis yang secara persis mencerminkan peringatan Al-Qur'an tentang tirani yang melanggengkan kekuasaannya dengan memecah belah masyarakat:

إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضَعِفُ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ

“Sesungguhnya Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah, dengan menindas segolongan dari mereka, menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak-anak perempuan mereka. Sesungguhnya Fir'aun termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan.” [QS. Al-Qasas: 4].

Sebagaimana representasi Fir'aun dalam ayat tersebut, otoritas kolonial VOC mendudukan dirinya sebagai kekuatan adidaya yang menundukkan (Jawa) dengan menjadikannya bergolongan-golongan (*syi'ya'an*), sehingga mereka sibuk bertikai secara kultural dan melupakan musuh strukturalnya yang sebenarnya.

3. Domestikasi dan Sekularisasi Hukum Islam (*Pengadilan Surambi*)

Dampak paling signifikan dari *Palihan Nagari* bagi umat Islam adalah domestikasi syariat. Peter Carey (2007) dalam *The Power of Prophecy* menyoroti bahwa sebelum era Giyanti, hukum kerajaan Mataram sering kali tidak memiliki batasan yang tegas antara hukum adat (*pradata*) dan hukum Islam. Namun, pasca-pembelahan dan di bawah tekanan VOC, struktur hukum dipecah secara sistematis.

Keraton Surakarta dan Yogyakarta melembagakan **Pengadilan Surambi** (bertempat di serambi Masjid Agung) yang dikepalai oleh seorang Penghulu Tafsir Anom. Akan tetapi, yurisdiksi pengadilan Islam ini dikebiri secara politis. Pengadilan Surambi hanya diberi kewenangan untuk mengurus hukum privat atau keperdataan murni (*Ahwal Al-Syakhshiyah*), seperti nikah, talak, rujuk, dan waris (*munakahat* dan *mawaris*).

Sementara itu, hukum pidana (*jinayat*), hukum publik, politik, dan pertanahan ditarik ke dalam **Pengadilan Pradata** (di dalam keraton) yang dikendalikan oleh raja dan diawasi ketat oleh Residen VOC berdasarkan campuran antara adat Jawa dan hukum Eropa. Pemisahan ini merupakan titik awal dari proses **sekularisasi diam-diam** di tanah Jawa. Ulama dan kiai keraton direduksi fungsinya menjadi sekadar "pegawai pencatat nikah" dan "pembaca doa" dalam ritual-ritual kebesaran keraton (seperti *Grebeg* dan *Sekaten*), kehilangan daya kritis mereka sebagai penjaga moral dan kebijakan politik negara.

Kondisi inilah yang kelak melahirkan polarisasi antara "Ulama Keraton" (yang tunduk pada hierarki birokrasi dan kompromistis terhadap penjajah) dan "Ulama Pesantren" (yang menyingkir ke pelosok desa, menolak bersentuhan dengan keraton dan Belanda, serta mempertahankan independensi syariat murni), sebuah dikotomi sosiologis umat Islam Jawa yang jejaknya masih dapat dirasakan hingga Indonesia modern.

7.3 Kesimpulan: Mataram dalam Lanskap Sejarah Nusantara

Menelusuri lintasan sejarah Mataram Islam—dari kebangkitan kosmologis di Hutan Mentaok hingga kehancuran tragisnya di meja perundingan Giyanti dan Salatiga—berarti membaca sebuah epik tentang kejayaan yang digerogeti oleh kontradiksi internalnya sendiri. Mataram Islam bukanlah sebuah entitas yang statis; ia adalah panggung eksperimen sosiopolitik, militer, dan kultural terbesar di Pulau Jawa pada era pramodern. Di bentang lanskap Sejarah Nusantara, posisi Mataram menempati ruang yang sangat paradoksal: ia adalah imperium agraris terkuat yang pernah mempersatukan tanah Jawa, namun sekaligus menjadi pintu masuk bagi penjajahan kolonial yang paling langgeng di Nusantara.

1. Paradoks Kekuasaan: Absolutisme Tanpa Institusionalisasi

Kesimpulan struktural pertama yang dapat ditarik dari sejarah Mataram adalah kegagalan transformatif dari *personal rule* (kekuasaan berbasis figur) menuju pelebagaan negara yang rasional. Imperium ini sangat bergantung pada kharisma, teror, dan kapasitas militer individual seorang raja. Di tangan figur sekuat Sultan Agung, sistem despotisme agraris mampu dimobilisasi untuk membangun peradaban dan melancarkan perang berskala masif. Namun, ketika takhta diwariskan kepada figur-figur yang paranoid (Amangkurat I) atau oportunistis dan lemah (Pakubuwana II), sistem yang sangat tersentralisasi ini runtuh dengan sendirinya.

Ketiadaan hukum primogenitur yang disepakati menjadi "dosa asal" ketatanegaraan Mataram. Tanpa mekanisme suksesi yang damai, setiap pergantian kepemimpinan selalu diwarnai pertumpahan darah antarsaudara. Kelemahan genetik inilah yang secara presisi dieksploitasi oleh *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC). VOC tidak menaklukkan Jawa semata-mata dengan peluru dan meriam, melainkan dengan membiayai ambisi para pangeran Mataram untuk saling menghancurkan.

2. Warisan Sains Falak dan Sintesis Epistemologis

Jika imperium politiknya hancur lebur dan terfragmentasi akibat intervensi kolonialis, warisan intelektual Mataram justru tetap hidup dan melintasi zaman. Mataram berhasil melahirkan sebuah kebudayaan sintesis yang luar biasa. Pencapaian paling monumental yang menembus batas-batas politik keraton adalah rekayasa kalender Sultan Agung pada tahun 1633 M.

Keputusan keraton untuk menyatukan kosmologi waktu agraris (solar/Saka) dengan syariat Islam pesisir (lunar/Hijriah) membuktikan bahwa peradaban ini pernah memiliki visi sains astronomi (ilmu falak) yang jauh melampaui masanya. Integrasi epistemologi waktu ini merupakan salah satu tonggak terpenting dalam sejarah astronomi Islam di Nusantara. Ia menegaskan bahwa harmonisasi antara kalkulasi peredaran benda langit (*hisab*) dan kearifan ekologis lokal dapat mewujudkan dalam sebuah sistem penanggalan yang fungsional. Bahkan hingga hari ini, warisan pemikiran astronomis tersebut tetap menjadi diskursus yang relevan, meletakkan fondasi historis bagi perdebatan ilmu falak kontemporer dan sistem kalender hijriah di Indonesia.

3. Refleksi Teologis-Historis: Siklus Jatuh Bangunnya Peradaban

Dalam perspektif filsafat sejarah Islam (sebagaimana dirumuskan oleh Ibnu Khaldun tentang *Asabiyyah* atau solidaritas sosial), Mataram mengalami siklus alamiah dari pembentukan, kejayaan, kemewahan, hingga kemerosotan. Solidaritas agraris yang awalnya menjadi mesin penggerak Panembahan Senopati, pada akhirnya hancur oleh kezaliman elit keraton dan gaya hidup hedonis di era Kartasura.

Jatuh bangunnya dinasti Mataram merupakan manifestasi empiris dari *Sunnatullah* mengenai pergiliran kekuasaan di antara manusia, sebuah realitas sosiologis yang secara indah dan tegas termaktub dalam Al-Qur'an:

إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ ۚ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ
الظَّالِمِينَ

"Jika kamu (pada perang Uhud) mendapat luka, maka sesungguhnya kaum (kafir) itupun (pada perang Badar) mendapat luka yang serupa. Dan masa (kejayaan dan kehancuran) itu Kami pergilirkan di antara manusia (agar mereka mendapat pelajaran); dan supaya Allah membedakan orang-orang yang beriman (dengan orang-orang kafir) supaya sebagian kamu dijadikan-Nya (gugur sebagai) syuhada'. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim." [QS. Ali 'Imran: 140].

Ayat ini merangkum seluruh esensi sejarah Mataram. Kejayaan yang pernah direngkuh oleh Sultan Agung digilirkan menuju kehancuran ketika para penerusnya, dari Amangkurat I hingga Pakubuwana II, memilih jalan kezaliman terhadap rakyatnya sendiri dan tunduk pada hegemoni kekuatan asing.

4. Penutup: Cermin Retak di Jantung Jawa

Pada akhirnya, *Fakta Sejarah Mataram Islam* menyajikan sebuah "cermin retak" bagi identitas bangsa kita hari ini. Peristiwa Palihan Nagari mengakhiri kedaulatan politik Mataram, mengubah para raja-raja penakluk menjadi sekadar patron kesenian dan penjaga tata krama dalam bingkai *Theater State*. Namun, luka sejarah, intrik istana, ketahanan laskar gerilya kaum tani, hingga sintesis kebudayaan dan keagamaan yang ditinggalkannya, telah meresap jauh ke dalam DNA politik, sosiologi, dan keagamaan masyarakat Jawa modern.

Mempelajari Mataram bukan sekadar menziarahi kuburan masa lalu, melainkan membaca sebuah *grand narrative* tentang bagaimana kekuasaan harus dibangun di atas keadilan, pentingnya kedaulatan yang mandiri dari cengkeraman asing, dan keharusan mengintegrasikan rasionalitas dengan spiritualitas demi kelangsungan sebuah peradaban.

DAFTAR PUSTAKA BAB 7

Carey, P. (2007). *The Power of Prophecy: Prince Dipanagara and the End of an Old Order in Java, 1785-1855*. KITLV Press.

Florida, N. K. (1995). *Writing the Past, Inscribing the Future: History as Prophecy in Colonial Java*. Duke University Press.

Geertz, C. (1980). *Negara: The Theatre State in Nineteenth-Century Bali*. Princeton University Press. (Digunakan sebagai landasan teoretis komparatif untuk sosiologi keraton Nusantara).

Lombard, D. (1990). *Le Carrefour Javanais: Essai d'histoire Globale* [Nusa Jawa: Silang Budaya]. Éditions de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales.

Moertono, S. (1981). *State and Statecraft in Old Java: A Study of the Later Mataram Period, 16th to 19th Century*. Monograph Series, Cornell Modern Indonesia Project. Cornell University.

Ricklefs, M. C. (1974). *Jogjakarta under Sultan Mangkubumi 1749-1792: A History of the Division of Java*. Oxford University Press.

Ricklefs, M. C. (2001). *A History of Modern Indonesia since c. 1200* (3rd ed.). Stanford University Press.

Schrieke, B. J. O. (1955). *Indonesian Sociological Studies: Selected Writings of B. Schrieke* (Vol. 1). W. van Hoeve.

BAB 8: RINGKASAN SEJARAH MATARAM ISLAM

1. Awal Mula dan Kebangkitan (Era Kotagede)

Kerajaan Mataram Islam bermula dari sebidang tanah perdikan di Alas Mentaok yang dianugerahkan kepada Ki Ageng Pemanahan. Di bawah kepemimpinan putranya, Danang Sutawijaya (Panembahan Senopati), Mataram melepaskan diri dari hegemoni Kerajaan Pajang dan mendeklarasikan diri sebagai entitas independen (1587). Legitimasi awal Mataram tidak hanya dibangun lewat penaklukan militer, tetapi juga melalui rekayasa mitologi dan kosmologi Jawa, seperti klaim atas *Wahyu Keprabon* dan dukungan spiritual penguasa Laut Selatan.

2. Puncak Kejayaan Imperium Agraris (Era Sultan Agung)

Fase keemasan Mataram tercapai pada masa pemerintahan Sultan Agung Hanyakrakusuma (1613–1645). Ia berhasil menyatukan hampir seluruh Pulau Jawa (kecuali Banten dan Batavia) dan berani melancarkan dua kali invasi militer langsung ke markas VOC di Batavia. Selain hegemoni politik, Sultan Agung mewariskan mahakarya kultural dan sains dengan menciptakan **Kalender Jawa Islam (1633)**, sebuah sintesis jenius yang memadukan sistem peredaran matahari (Saka) kaum agraris dengan peredaran bulan (Hijriah) kaum santri pesisir.

3. Despotisme dan Keruntuhan Plered (Era Amangkurat I)

Transisi kekuasaan kepada Amangkurat I (1646–1677) membawa Mataram ke era teror dan paranoia. Ia memerintah dengan sentralisasi ekstrem dari dalam benteng tertutup di Plered, membantai ribuan ulama yang berseberangan secara politik, dan mencekik ekonomi pesisir. Kezaliman ini melahirkan resistensi masif berupa Pemberontakan Trunojoyo (didukung laskar Makassar) yang berhasil menghancurkan Keraton Plered pada 1677. Amangkurat I terusir dan tewas dalam pelariannya.

4. Jebakan Kolonial dan Perang Suksesi (Era Kartasura)

Penerusnya, Amangkurat II, mendirikan keraton baru di Kartasura dengan bantuan militer VOC. Bantuan ini harus dibayar mahal melalui penandatanganan Perjanjian Jepara (1677) yang menggadaikan kedaulatan wilayah pesisir dan menyeret Mataram ke dalam jebakan utang (*debt trap*). Era Kartasura (1680–1745) diwarnai oleh instabilitas akut melalui tiga episode Perang Suksesi Jawa, di mana VOC bertindak sebagai *Kingmaker*. Meskipun muncul perlawanan heroik dari Untung Surapati, Kartasura akhirnya hancur lebur akibat imbas dari *Geger Pecinan* (1740–1743) pada masa raja plin-plan, Pakubuwana II.

5. Fragmentasi Permanen (Palihan Nagari)

Dalam kondisi kedaulatan yang telah direnggut sepenuhnya oleh VOC, keraton dipindahkan ke Surakarta (1745). Konflik internal kembali pecah menjadi Perang Mangkubuman akibat pengingkaran janji Pakubuwana II terhadap Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said

(Pangeran Sambernyawa). Karena VOC kehabisan dana untuk berperang, mereka menerapkan taktik diplomasi *divide et impera*. Mataram secara definitif menemui ajalnya sebagai kerajaan tunggal melalui dua perjanjian:

- **Perjanjian Giyanti (1755):** Membelah Mataram menjadi Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta (dipimpin Sultan Hamengkubuwana I).
- **Perjanjian Salatiga (1757):** Memecah lagi wilayah Surakarta untuk memberikan otonomi kepada Raden Mas Said sebagai KGPAA Mangkunegara I.

6. Epilog: Warisan dan Involusi Kultural

Runtuhnya Mataram bukan sekadar akibat siasat kelicikan Belanda, melainkan berakar dari cacat struktural kerajaan itu sendiri: ketiadaan hukum waris takhta yang baku (*primogenitur*), hilangnya akses maritim, dan erosi moral elit keraton. Pasca-terpecah belah, keraton-keraton Jawa mengalami *involusi kultural*. Kehilangan fungsi militernya, keraton beralih menjadi "Negara Teater" yang mencurahkan energinya pada penciptaan sastra sinkretis (Sintesis Yosodipuran), hierarki tata krama (tingkatan bahasa Jawa), dan ritual estetika sebagai kompensasi atas hilangnya kekuasaan politik di bawah cengkeraman kolonial.

DAFTAR PUSTAKA LENGKAP

- Andaya, L. Y. (1981). *The Heritage of Arung Palakka: A History of South Sulawesi (Celebes) in the Seventeenth Century*. Martinus Nijhoff.
- Berg, C. C. (1938). *Javaansche geschiedschrijving* [Historiografi Jawa]. In F. W. Stapel (Ed.), *Geschiedenis van Nederlandsch Indië* (Vol. 2, pp. 7-148). Joost van den Vondel.
- Carey, P. (2007). *The Power of Prophecy: Prince Dipanagara and the End of an Old Order in Java, 1785-1855*. KITLV Press.
- De Graaf, H. J. (1954). *De regering van Panembahan Sénapati Ingalaga* [Pemerintahan Panembahan Senopati Ingalaga]. KITLV (Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde).
- De Graaf, H. J. (1958a). *De regering van Panembahan Séda-ing-Krapjak 1601-1613* [Pemerintahan Panembahan Seda-ing-Krapyak 1601-1613]. KITLV.
- De Graaf, H. J. (1958b). *De regering van Sultan Agung, Vorst van Mataram, 1613-1645, en die van zijn voorganger Panembahan Séda-ing-Krapjak, 1601-1613* [Pemerintahan Sultan Agung, Penguasa Mataram, 1613-1645, dan Pendahulunya Panembahan Seda-ing-Krapyak]. KITLV.
- De Graaf, H. J. (1961). *De regering van Sunan Mangku-Rat I Tegal-Wangi, vorst van Mataram, 1646-1677. Deel I: De ontbinding van het rijk* [Pemerintahan Sunan Amangkurat I Tegal-Wangi, Penguasa Mataram, 1646-1677. Bagian I: Disintegrasi Kerajaan]. KITLV.
- De Graaf, H. J. (1962). *De regering van Sunan Mangku-Rat I Tegal-Wangi, vorst van Mataram, 1646-1677. Deel II: Opstand en ondergang* [Pemerintahan Sunan Amangkurat I Tegal-Wangi, Penguasa Mataram, 1646-1677. Bagian II: Pemberontakan dan Keruntuhan]. KITLV.
- Florida, N. K. (1995). *Writing the Past, Inscribing the Future: History as Prophecy in Colonial Java*. Duke University Press.
- Geertz, C. (1980). *Negara: The Theatre State in Nineteenth-Century Bali*. Princeton University Press.
- Houben, V. J. H. (1994). *Kraton and Kumpeni: Surakarta and Yogyakarta, 1830-1870*. KITLV Press.
- Kumar, A. (1976). *Surapati, Man and Legend: A Study in Three Babad Traditions*. E. J. Brill.
- Kumar, A. (1980). *Javanese Historiography in and of the "Colonial Period": A Case Study*. In A. Reid & D. Marr (Eds.), *Perceptions of the Past in Southeast Asia* (pp. 187-206). Heinemann Educational Books.

Lombard, D. (1990). *Le Carrefour Javanais: Essai d'histoire Globale* [Nusa Jawa: Silang Budaya]. Éditions de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales.

Moertono, S. (1981). *State and Statecraft in Old Java: A Study of the Later Mataram Period, 16th to 19th Century*. Monograph Series, Cornell Modern Indonesia Project. Cornell University.

Nagtegaal, L. (1996). *Riding the Dutch Tiger: The Dutch East Indies Company and the Northeast Coast of Java, 1680-1743*. KITLV Press.

Pigeaud, T. G. T., & De Graaf, H. J. (1976). *Islamic States in Java 1500-1700: Eight Dutch Books and Articles by Dr. H.J. de Graaf*. Martinus Nijhoff.

Reid, A. (1988). *Southeast Asia in the Age of Commerce, 1450-1680: Volume One: The Lands Below the Winds*. Yale University Press.

Reid, A. (1993). *Southeast Asia in the Age of Commerce, 1450-1680: Volume Two: Expansion and Crisis*. Yale University Press.

Rommelink, W. G. J. (1994). *The Chinese War and the Collapse of the Javanese State, 1725-1743*. KITLV Press.

Ricklefs, M. C. (1974). *Jogjakarta under Sultan Mangkubumi 1749-1792: A History of the Division of Java*. Oxford University Press.

Ricklefs, M. C. (1993). *War, Culture and Economy in Java, 1677-1726: Asian and European Imperialism in the Early Kartasura Period*. Asian Studies Association of Australia in association with Allen & Unwin.

Ricklefs, M. C. (2001). *A History of Modern Indonesia since c. 1200* (3rd ed.). Stanford University Press.

Ricklefs, M. C. (2006). *Mystic Synthesis in Java: A History of Islamization from the Fourteenth to the Early Nineteenth Centuries*. Eastbridge.

Schrieke, B. J. O. (1955). *Indonesian Sociological Studies: Selected Writings of B. Schrieke* (Vol. 1). W. van Hoeve.

Schrieke, B. J. O. (1957). *Indonesian Sociological Studies: Ruler and Realm in Early Java* (Vol. 2). W. van Hoeve.

GLOSARIUM ISTILAH (A-Z)

A – Abangan (Kejawen): Golongan masyarakat Jawa (umumnya di pedalaman) yang mempraktikkan Islam secara sinkretis, dengan masih mempertahankan unsur-unsur kosmologi, animisme, dan tradisi Hindu-Buddha peninggalan masa lalu.

B – Babad: Karya sastra historiografi tradisional Jawa yang cenderung mencampurkan fakta empiris dengan mitos, genealogi ilahiah, dan legitimasi teologis-politis bagi raja yang sedang berkuasa (contoh: *Babad Tanah Jawi*).

C – Cacah (Caca Jiwa): Unit sensus demografis sekaligus basis pajak dan wajib militer di Mataram; merujuk pada satu kesatuan keluarga petani (kepala keluarga, istri, dan anak) yang diwajibkan menggarap lahan dan menyetorkan upeti kepada keraton.

D – Devide et Impera: Siasat militer dan diplomasi politik (Pecah Belah dan Kuasai) yang digunakan oleh VOC untuk menghancurkan kesatuan musuh dari dalam melalui intrik, provokasi, dan aliansi selektif (terlihat jelas menjelang Perjanjian Giyanti).

E – Eksodus: Perpindahan penduduk secara besar-besaran; dalam konteks buku ini merujuk pada pelarian laskar Tionghoa dari Batavia ke pedalaman Jawa Tengah pasca-pembantaian 1740, yang memicu *Geger Pecinan*.

F – Falak (Ilmu Falak): Sains astronomi Islam yang mempelajari lintasan benda-benda langit untuk menentukan waktu ibadah dan penanggalan. Di era Sultan Agung, ilmu ini direkayasa untuk menyatukan kalender Saka dan Hijriah.

G – Geger Pecinan: Peristiwa pemberontakan dan peperangan semesta (1740-1743) yang melibatkan aliansi laskar pelarian Tionghoa dan bangsawan Jawa melawan VOC, yang berujung pada hancurnya keraton Kartasura.

H – Hamengkubuwana: Gelar dinasti penguasa Kasultanan Yogyakarta Hadiningrat, yang pertama kali disandang oleh Pangeran Mangkubumi pasca-Perjanjian Giyanti (1755). Bermakna "Pemangku/Pemelihara Keselamatan Dunia".

I – Involusi Kultural: Fenomena sosiologis di mana keraton (pasca-terbelah dan kehilangan kekuatan politik/militer) mengalihkan seluruh energinya ke dalam penyempurnaan kebudayaan, tata krama, dan kesenian secara berlebihan dan rumit.

J – Javanisasi Islam: Proses asimilasi dan lokalisasi nilai-nilai syariat Islam agar sesuai dengan kosmologi dan struktur budaya masyarakat Jawa; dipelopori secara masif pada era kepemimpinan Sultan Agung.

K – Kagungan Dalem: Konsep kepemilikan absolut dalam monarki Mataram; keyakinan hukum ketatanegaraan bahwa seluruh tanah, air, sumber daya, dan bahkan nyawa rakyat di wilayah Mataram adalah hak milik pribadi raja.

L – Lungguh (Tanah Lungguh/Appanage): Tanah jabatan yang dipinjamkan oleh raja beserta petani yang menggarapnya kepada para pejabat keraton, bupati, atau pangeran sebagai kompensasi atas pengabdian, karena keraton tidak menggaji menggunakan uang logam.

M – Mancanegara: Wilayah provinsi atau daerah pinggiran di luar pusat keraton (*Negaragung*) yang dipimpin oleh para Bupati; mereka memiliki otonomi khusus namun wajib menyetorkan upeti tahunan dan datang menghadap raja.

N – Negaragung: Wilayah "Negara Agung" atau episentrum geopolitik yang mengelilingi keraton secara langsung. Daerah ini tidak dipimpin oleh bupati, melainkan dikelola oleh *bekel* dan dihibahkan sebagai tanah *lungguh* bagi kerabat keraton.

O – Otonomi (Semu): Keadaan di mana bupati-bupati pesisir merasa memiliki kebebasan mengatur wilayahnya, yang sering kali ditumpas secara brutal oleh penguasa pusat (seperti sentralisasi ekstrem di era Amangkurat I).

P – Palihan Nagari: Peristiwa "Pembelahan Negara" Mataram menjadi dua entitas politik yang terpisah (Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta) melalui penandatanganan Perjanjian Giyanti pada tanggal 13 Februari 1755.

Q – Qamariyah: Sistem perhitungan waktu/kalender yang didasarkan pada fase peredaran bulan mengelilingi bumi (seperti Kalender Hijriah); diadopsi secara resmi oleh Sultan Agung menggantikan sistem matahari (solar/Syamsiyah).

R – Ratu Adil: Mitos mesianik dalam eskatologi Jawa tentang sosok pemimpin pembebas yang akan datang pada masa penderitaan (Zaman Edan) untuk memulihkan keadilan dan kemakmuran; sering disematkan rakyat kepada tokoh pemberontak seperti Pangeran Mangkubumi.

S – Surambi (Pengadilan Surambi): Institusi peradilan Islam yang bertempat di serambi Masjid Agung. Pada era kolonial, yurisdiksi pengadilan ini secara politis dikebiri dan dibatasi hanya untuk mengurus perdata/hukum keluarga (*munakahat* dan *mawaris*).

T – Tiji Tibèh: Semboyan militer egaliter yang dicetuskan oleh Raden Mas Said (Pangeran Sambernyawa). Merupakan singkatan dari *Mati siji mati kabèh, mukti siji mukti kabèh* (Mati satu mati semua, makmur satu makmur semua).

U – Ulama Keraton: Kiai atau cendekiawan muslim yang masuk ke dalam hierarki birokrasi kerajaan (seperti Penghulu Tafsir Anom), bertugas melegitimasi kebijakan raja dan memimpin ritual keagamaan istana.

V – VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie): Kongsi Dagang Hindia Timur Belanda (sering disebut Kompeni), sebuah perusahaan multinasional bersenjata yang memonopoli komoditas dan akhirnya menjadi *Kingmaker* yang mengendalikan takhta Mataram.

W – Wahyu Keprabon: Konsep teologis-kosmologis Jawa yang meyakini bahwa seorang raja hanya memiliki legitimasi untuk memerintah jika ia telah menerima wahyu atau mandat ilahiah yang turun dari langit kepadanya.

X – Xenofobia (Konteks Kolonial): Sentimen ketakutan dan kebencian terhadap orang asing/etnis lain. Penyakit sosial ini menjangkiti pejabat VOC (seperti Adriaan Valckenier) yang berujung pada pembantaian etnis Tionghoa di Batavia (1740) yang menjadi pemantik Geger Pecinan.

Y – Yosodipuran (Sintesis Yosodipuran): Era kebangkitan sastra di Kasunanan Surakarta yang dipelopori oleh pujangga Yosodipuro I dan II; ditandai dengan penulisan ulang naskah-naskah kuno yang memadukan ajaran tasawuf Islam dengan kebatinan Jawa.

Z – Zaman Keemasan (Golden Age): Puncak kejayaan politik, militer, dan kebudayaan imperium Mataram Islam yang terjadi pada masa pemerintahan Sultan Agung Hanyakrakusuma (1613–1645) sebelum terjadinya kemunduran di era para penerusnya.

LAMPIRAN 1 Peta Kekuasaan Mataram Islam



Peta tersebut mengilustrasikan luasnya pengaruh geopolitik Mataram Islam, yang mencapai puncak kejayaan ekspansinya pada era pemerintahan Sultan Agung Hanyakrakusuma (1613–1645). Pada masa keemasannya, struktur tata ruang dan pembagian wilayah kekuasaan Mataram Islam diklasifikasikan ke dalam sistem kosmologis yang terpusat, antara lain:

- **Kutanegara (Kraton/Kutha):** Episentrum kekuasaan yang menjadi tempat kedudukan Sultan dan pusat roda pemerintahan inti.
- **Negaragung:** Wilayah inti/agung yang mengelilingi ibu kota (meliputi daerah Mentaok, Pajang, dan sekitarnya). Wilayah ini dikelola secara langsung oleh keraton tanpa perantara Bupati, dan umumnya dijadikan *Tanah Lungguh* (tanah jabatan/apanase) bagi para pangeran dan pejabat tinggi.
- **Mancanegara:** Wilayah provinsi di luar episentrum (seperti Madiun, Kediri, Ponorogo, hingga Banyumas). Daerah ini dipimpin oleh para Bupati mancanegara yang memiliki otonomi tertentu namun diwajibkan untuk *seba* (menghadap) dan menyetorkan upeti tahunan ke keraton pusat.
- **Pasisiran:** Kawasan pelabuhan dan pesisir utara (seperti Demak, Jepara, Tuban, Surabaya) yang sangat strategis secara ekonomi maritim, namun kemudian diintegrasikan secara paksa ke dalam sistem agraris pedalaman pada era Sultan Agung.

Peta kekuasaan yang solid ini kelak mengalami kemunduran dan akhirnya terfragmentasi secara permanen pasca-ditandatanganinya Perjanjian Giyanti (1755) dan Perjanjian Salatiga (1757), yang membelah tanah Jawa menjadi Surakarta, Yogyakarta, dan Mangkunegaran.

Sumber: <https://idsejarah.net/>



Sejak tahun 1743, wilayah Mataram hanya tinggal Bagelan, Kedu, Jogjakarta dan Surakarta. Tragisnya, Mataram harus terpecah menjadi dua oleh perjanjian Giyanti pada tahun 1755. Mataram terpecah menjadi Kesunanan Surakarta dengan rajanya Susuhunan (Pakubuwono) dan Kesultanan Yogyakarta dengan Pangeran Mangkubumi (Hamengkubuwono I).

Pada tahun 1757, Kerajaan Surakarta pecah lagi menjadi wilayah yang dikuasai Pakubuwono dan wilayah yang dikuasai Mangkunegara I. Hal ini juga terjadi di Yogyakarta yang terpecah menjadi 2 yaitu wilayah Kesultanan yang dikuasai Sultan Hamengku Buwon III dan Kadipaten Pakualaman yang dipimpin Bendara Pangeran Natakusuma atau lebih dikenal dengan Pakualam I.

LAMPIRAN 2 Timeline Raja-Raja Mataram Islam (1587–1755)

Berikut adalah daftar kronologis raja-raja yang pernah memerintah Kerajaan Mataram Islam beserta garis waktu (*timeline*) kekuasaannya.

Daftar ini mencakup periode sejak berdirinya Mataram sebagai entitas independen di Hutan Mentaok, hingga runtuhnya kesatuan kerajaan ini akibat Perjanjian Giyanti pada tahun 1755.

No	Nama Asli (Muda)	Gelar Takhta / Nama Populer	Masa Kekuasaan	Catatan Sejarah Penting
1	Danang Sutawijaya	Panembahan Senopati (Panembahan Senapati Ingalaga)	1587 – 1601	Pendiri Mataram Islam. Melepaskan diri dari Pajang dan memulai ekspansi awal menaklukkan wilayah-wilayah di Jawa Tengah dan Jawa Timur.
2	Raden Mas Jolang	Panembahan Hanyakrawati (Panembahan Sedaing-Krapyak)	1601 – 1613	Membangun infrastruktur keraton dan area perburuan (Krapyak). Banyak menghadapi pemberontakan dari bupati pesisir dan wilayah timur. Wafat saat berburu.
3	Raden Mas Rangsang	Sultan Agung (Sultan Agung Hanyakrakusuma)	1613 – 1645	Puncak Kejayaan Mataram. Menyatukan hampir seluruh Pulau Jawa (kecuali Banten dan Batavia). Melakukan dua kali invasi ke Batavia (1628 & 1629) dan menciptakan Kalender Jawa (1633).
4	Raden Mas Sayidin	Amangkurat I (Sunan Tegalwangi)	1646 – 1677	Era despotisme berdarah dan sentralisasi ekstrem di Keraton Plered. Menandai awal kedekatan Mataram dengan VOC. Terusir dari keraton akibat pemberontakan Trunojoyo dan wafat dalam pelarian.
5	Raden Mas Rahmat	Amangkurat II (Sunan Amral)	1677 – 1703	Mendirikan Keraton Kartasura (1680). Menandatangani Perjanjian Jepara (1677) yang menggadaikan kedaulatan pesisir ke VOC demi bantuan militer untuk menumpas Trunojoyo.
6	Raden Mas Sutikna	Amangkurat III (Sunan Mas)	1703 – 1705	Bersikap anti-VOC dan melindungi Untung Surapati. Digulingkan dari takhta oleh pamannya sendiri (Pangeran Puger) yang dibantu oleh

				VOC, lalu diasingkan ke Ceylon (Sri Lanka).
7	Pangeran Puger	Pakubuwana I	1705 – 1719	Naik takhta melalui Perang Suksesi Jawa I dengan dukungan penuh VOC. Sebagai imbalannya, menyerahkan banyak wilayah konsesi ekonomi kepada Belanda.
8	Raden Mas Suryaputra	Amangkurat IV (Sunan Jawi)	1719 – 1726	Masa pemerintahannya diwarnai oleh Perang Suksesi Jawa II melawan saudara-saudaranya sendiri yang dibantu ulama anti-VOC. Posisi raja makin bergantung pada militer kompeni.
9	Raden Mas Prabasuyasa	Pakubuwana II	1726 – 1749	Raja yang sangat plin-plan. Mengalami tragedi <i>Geger Pecinan</i> yang menghancurkan Kartasura (1742). Memindahkan keraton ke Surakarta (1745) dan akhirnya menyerahkan seluruh kedaulatan Mataram ke VOC secara mutlak sebelum wafat (1749).
10	Raden Mas Suryadi	Pakubuwana III	1749 – 1755	Diangkat oleh VOC di tengah berkobarnya Perang Mangkubuman. Ia tidak memiliki kekuatan nyata dan akhirnya dipaksa menandatangani Perjanjian Giyanti (1755) .

Catatan Akhir Kesatuan Mataram:

Setelah penandatanganan Perjanjian Giyanti pada 13 Februari 1755 (*Palihan Nagari*), imperium Mataram Islam secara resmi berakhir dan terbelah menjadi dua entitas yang lebih kecil:

1. **Kasunanan Surakarta Hadiningrat** (dipimpin oleh Pakubuwana III).
2. **Kasultanan Yogyakarta Hadiningrat** (dipimpin oleh Pangeran Mangkubumi yang bergelar Sultan Hamengkubuwana I).

Dua tahun kemudian (1757), wilayah Surakarta dipecah lagi untuk memberikan ruang bagi Raden Mas Said (Pangeran Sambernyawa) dengan mendirikan **Kadipaten Mangkunegaran**.

PENULIS



KASMUI

- Dosen Kimia, Komputasi, IT, dan AI UNNES, serta Praktisi Ilmu Falak;
- Anggota Majelis Tabligh PDM Kota Semarang dan PWM Jawa Tengah;
- Anggota Tim Pengembang Software KHGT MTT PP Muhammadiyah;
- Website pribadi: <https://hisabmu.com/>, <https://kasmui.cloud/>;
- Minat & Hobi: Computer programming.

FAKTA SEJARAH MATARAM ISLAM: Awal sampai Akhir

Temukan fakta-fakta sejarah menakutkan tentang bangkit dan runtuhnya Kesultanan Mataram Islam, kekuatan politik terbesar di Jawa. Buku ini menelusuri kisah dinasti ini dari masa kepemimpinan Panembahan Senopati yang penuh visi, keemasan militer dan budaya di bawah Sultan Agung, hingga masa-masa sulit pasca-Giyanti yang membelah imperium. Diperkaya dengan detail kehidupan istana, konflik politik, warisan seni, dan interaksi dengan kolonialis Belanda. Sebuah perjalanan sejarah mendalam bagi siapa saja yang ingin memahami akar budaya dan politik Jawa modern.



Letter size: 8.5x11 inches)



9 787885 384522



KASMUI